



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Praktik dan Pengaruh Kepemimpinan Kyai dan Jawara  
Pada Pilkada Kota Serang Tahun 2008**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains**

**ZULIYANTO**

**0706190282**

**PROGRAM PASCASARJANA  
KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
KAJIAN STRATEJIK PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN  
JAKARTA  
JUNI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : ZULIYANTO**

**NPM : 0706190282**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : Juli 2009**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : ZULIYANTO  
NPM : 0706190282  
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian  
Strategik Pengembangan Kepemimpinan  
Judul Tesis : Praktik dan Pengaruh Kepemimpinan Kyai dan Jawara  
Pada Pilkada Kota Serang Tahun 2008

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Paska Sarjana Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Wilman Dahlan Mansoer, M.Org.Psy



Ketua Sidang : Dr. Chandra Wijaya



Penguji : Dr. Puji Wahono



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah mengalirkan kasih dan sayangNya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan anugerah yang istimewa untuk menjadi mahasiswa pada Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Shalawat dan salam semoga senantiasa teruntai untuk Rasulullah saw yang telah membuka tabir kejahilian manusia menuju zaman yang terang benderang oleh cahaya ilmu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberi dukungan dan inspirasi selama menjalani pendidikan dan penyusunan Tesis ini, yaitu:

1. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang telah memberikan beasiswa kepada saya untuk menempuh pendidikan di Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
2. Bapak Dr. Wilman Dahlan yang dengan sabar menuntun penulis menyelesaikan thesis ini ditengah kesibukanya sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Semoga Allah memberikan surga sebagai hadiah terbaik atas segala jasanya.
3. Dr. Chandra Wijaya selaku Ketua Sidang dan Dr. Puji Wahono selaku Penguji yang telah memberikan banyak masukan dalam sidang ujian untuk perbaikan thesis ini
4. Seluruh Dosen pada Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia yang telah mendidik Peneliti selama Peneliti menempuh pendidikan;
5. Istri saya tercinta, Nuri Endah Berlianti, S.P yang telah dikirmkan oleh Allah untuk menjadi pelabuhan hati penulis ditengah-tengah jadwal akademik yang padat, atas kesabaran dan kelembutanya menemani hari-hari berat penulis. Juga kepada calon buah hati saya tersayang yang masih nyaman berada dalam kandungan *umminya*.

6. Orang tua saya Bapak Soenarman dan Ibu Hudaefah yang tak pernah lelah menjadi sumber motivasi penulis dalam mengarungi kehidupan, juga kepada mertua saya Bapak Soedaryanto dan Ibu Koen Sawitri yang telah mempercayakan buah hatinya kedalam pelukan penulis
7. Kepada seluruh informan yang telah memberikan banyak pelajaran kepada penulis dalam berbagai kesempatan wawancara dan juga kepada Ihya dan A'Amat yang menemani penulis dalam melakukan wawancara.
8. Kepada Bpk. Mustafa Kamal, S.S (Anggota DPR RI) yang telah memberikan kekeluasan waktu bagi penulis untuk tidak berada dikantor selama pengerjaan thesis ini. Juga kepada Ustadz Abu Ridho (Anggota DPR RI) dan Zaki Nabihah yang telah memberikan banyak bantuan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Andi Amrullah, Lc, Mas Haryo Setyoko, dan seluruh rekan-rekan di Fraksi PKS DPR RI yang dengan kehangatannya menemani pengerjaan thesis ini dikantor.
9. Buat seluruh anggota bimbingan Gank Psiko (Bang Yos, Pa Bud, Vira), semoga kita jadi alumni yang tangguh.

Penulis memohon maaf kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian thesis ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. InsyaAllah segala jasanya tidak akan pernah luput dari catatan Allah.

Terakhir penulis berharap semoga thesis ini memberi manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Zuliyanto

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS  
(Hasil Karya Perseorangan)**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULIYANTO  
NPM : 0706190282  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Kajian : Strategik Pengembangan Kepemimpinan  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Praktik dan Pengaruh Kepemimpinan Kyai dan Jawara  
Pada Pilkada Kota Serang Tahun 2008**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta  
Pada tanggal: Juli 2009  
Yang menyatakan



ZULIYANTO

## ABSTRAK

Nama : ZULIYANTO  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Judul : Praktik dan Pengaruh Kepmimpinan Kyai dan Jawara  
Pada Pilkada Kota Serang Tahun 2008

Kyai dan Jawara ditengah – tengah masyarakat Banten sejak dahulu menempati peran yang sangat strategis. Kedudukanya yang sangat dihormati menjadikanya sebagai tempat untuk dimintakan pendapat terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pendapatnya bahkan kerap sangat menentukan berbagai perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Banten termasuk didalamnya dalam bidang politik. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji praktik dan pengaruh kepemimpinan Kyai dan Jawara pada pemilihan kepala daerah di Kota Serang, Propinsi Banten.

Penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan yang dikeluarkan oleh Kouzes dan Posner bahwa seorang pemimpin memberikan contoh, menginspirasi visi bersama, memberikan semangat, menantang proses, memungkinkan orang lain bertindak.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara secara mendalam kepada para informan untuk mendapatkan data. Selain itu digunakan juga studi pustaka untuk melengkapinya.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa Kyai dan Jawara mempraktikan kepemimpinanya dengan cara berbeda. Kyai dengan cara bebas dan demokratis, sementara Jawara dengan cara otoriter. Hasil lainnya yaitu pengaruh kepemimpinan Jawara dalam Pilkada lebih kuat daripada Kyai.

Kata Kunci: Praktik, Pengaruh, Kepemimpinan, Kyai, Jawara, Pilkada

## ABSTRACT

Name : Zuliyanto  
Study Program : National Resilience Studies  
Title : The Practices and Influences of *Kyai* and *Jawara* in the 2008 Regent Election in Serang Regency

*Kyai* and *Jawara* had placed in a strategic part in the Banten communities for long time. Their position is so respectful that make them an advisor of the community especially in solving problems in the society. Their opinions usually are decisive in deciding all kind of changes that occur in many aspects of life in the society included the politic. This research is conducted to study the practices and influences of *Kyai* and *Jawara* in the Regent Election in Serang, Banten.

This research used the leadership theory by Kouzes and Posner (2004) who stated five leadership practises which are giving model the way, inspire a shared vision, encourage the heart, challenge the process, and enable others to act. It also used qualitative approach and made several depth interviews with the informants to gather the data. Besides, the researcher also applied the literature study to complete it.

The result of the research shows that *Kyai* and *Jawara* practise their leadership differently. The *Kyai* use a more moderate and democratic way, while the *Jawara* use the authoritative. Another conclusion is the fact that the leadership influences of the *Jawara* are stronger than the *Kyai*.

Keywords: Practises, Influences, Leadership, *Kyai*, *Jawara*, and Regent Election



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Permasalahan .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Batasan Penelitian .....	8
1.6 Sitematika Penulisan.....	8
<b>2. LANDASAN TEORI</b> .....	11
2.1 Peran Kepemimpinan Kyai dan Jawara .....	11
2.2 Kepemimpinan Kyai dan Jawara .....	13
2.3 Kepemimpinan Kyai .....	17
2.4 Kepemimpinan Jawara.....	24
2.5 Pemekaran Wilayah, Pemerintahan Daerah dan Pilkada.....	30
<b>3. METODE PENELITIAN</b> .....	35
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Teknik Pengumpulan data .....	35
3.3 Sumber Data .....	36

3.4 Analisis Data.....	37
3.5 Keabsahan Data .....	38
<b>4. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Sejarah Kota Serang.....	39
4.2 Pilkada Kota Serang.....	41
<b>5. PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
5.1 Keterlibatan Kyai dan Jawara Dalam Pilkada.....	50
5.2 Praktik Kepemimpinan Kyai dan Jawara .....	51
5.2.1 Praktik Kepemimpinan Kyai dalam Pilkada.....	51
5.2.2 Pengaruh Kepemimpinan Kyai dalam Pilkada .....	61
5.2.3 Praktik Kepemimpinan Jawara dalam Pilkada.....	66
5.2.4 Pengaruh Kepemimpinan Jawara dalam Pilkada .....	71
<b>6. Penutup .....</b>	<b>76</b>
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran .....	77
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1: Kategorisasi Awal Informan .....	37
Tabel 4.1: Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2008.....	43
Tabel 4.2: Latar Belakang Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2008.....	44
Tabel 4.3: Partai Politik Pengusung Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2008 .....	46
Table 4.4 : Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Putaran Pertama .....	47
Tabel 4.5 : Perolehan Suara Pilkada Kota Serang Putaran Kedua .....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kyai dan Jawara ditengah – tengah masyarakat Banten sejak dahulu menempati peran kepemimpinan yang sangat strategis. Sebagai seorang pemimpin, Kyai dan Jawara kerap dijadikan sebagai tempat untuk dimintakan pendapat terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat termasuk didalamnya dalam bidang politik. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji praktik dan pengaruh kepemimpinan Kyai dan Jawara pada pemilihan kepala daerah di Kota Serang, Propinsi Banten.

Kajian mengenai Kyai dan Jawara sudah dilakukan oleh beberapa peneliti baik mengenai Kyai dan Jawara yang diteliti secara terpisah maupun yang berusaha menemukan kaitan antara Kyai dan Jawara. Beberapa penelitian sebelumnya misalnya yang dilakukan oleh Tihami (1992) mengupas tentang agama, magi dan kepemimpinan Kyai dan Jawara dengan melakukan penelitian di sebuah desa di Banten.

Tihami (1992) mengungkapkan bahwa kedudukan kyai dan jawara dalam sistem sosial pada kenyataannya mendapat sumbangan dari magi dan agama. Agama yang menyebabkan lahirnya kepemimpinan kiyai dan jawara, berfungsi memperkuat kepemimpinan kyai dengan memberikan legitimasi. Pemberian legitimasi ini mengakibatkan kiyai dan jawara berada pada kepemimpinan agama dan masyarakat (kebudayaan) sebab agama juga menyediakan simbol-simbol kebudayaan. Sebagaimana agama memberikan legitimasi yang memperkuat kedudukan kyai dan jawara, demikian pula halnya dengan magi. Magi, menentukan munculnya kepemimpinan kyai dan jawara sebab dengan magi itu kyai dan jawara mempunyai kelebihan yaitu berupa “keluarbiasaan”.

Jadi agama, magi dan kepemimpinan dalam kyai dan jawara diBanten menurut kesimpulan Tihami (1992) terjalin dalam hubungan simbiotik (fungsi) dan sibermetik yang menjadikan kepemimpinan kyai dan jawara di Banten tetap lestari.

Penelitian yang dilakukan oleh Rivai (2003) menjelaskan bahwa budaya Jawara dan Kejawaraan sejak lama telah menjadi salah satu pola kepemimpinan informal dalam lingkungan masyarakat. Bersama – sama dengan kalangan formal dan informal lainnya, peran jawara semakin terlihat dalam berbagai bentuk khususnya dalam penempatan berbagai pejabat daerah. Hal ini disebabkan sebelumnya para pemimpin formal biasanya mendapatkan restu dari para jawara sebelum mereka menduduki jabatannya.

Konflik kepentingan ini menyebabkan para Jawara dengan leluasa mempengaruhi berbagai macam kebijakan pemerintahan dan implementasinya. Masuknya jawara untuk mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintahan menimbulkan kekhawatiran terjadinya pergeseran nilai-nilai luhur kejawaraan seperti sikap ksatria, berani dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran dalam menegakkan keadilan dikarenakan Jawara cenderung memakai budaya kekerasan. Budaya kekerasan ini kemudian dimanfaatkan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan untuk menghindari penolakan-penolakan dari masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kepemimpinan koersif Jawara dimanifestasikan dalam bentuk yang halus berupa tekanan-tekanan sampai dengan yang paling kasar berupa kekerasan. Namun berbagai tindakan negatif jawara sulit tersentuh dengan hukum karena adanya hubungan yang eksklusif dan tertutup antara jawara dan penguasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Abrori (2003) mengkaji perilaku politik jawara Banten dalam proses politik di Banten. Abrori (2003) menyimpulkan bahwa secara umum perilaku politik jawara menggunakan pola perilaku pragmatis dimana upaya-upaya memperoleh dan mempertahankan dominasi adalah untuk mengejar nilai-nilai (values) dalam bentuk ekonomi yang ditunjukkan dengan adanya doktrin “Bela diri Bela Bangsa Bela Negara” yang dimaknai sebagai jihad untuk mendapatkan materi dan kepentingan pribadi. Doktrin ini pula dimaknai sebagai pendorong para jawara untuk bertindak sebagai pengaman Serang.

Abrori (2003) juga mengungkapkan bahwa budaya politik para jawara menggunakan pola *partisipan kaula*.<sup>1</sup> Sedangkan secara legitimasi, jawara mendapatkan legitimasi budaya dan legitimasi struktural. Legitimasi budaya diperoleh karena otoritas jawara diperoleh dari otoritas tradisional sedangkan legitimasi struktural diperoleh karena sebagian jawara masuk kedalam ranah struktural sehingga mereka pun akhirnya mendapatkan legitimasi struktural. Pola interaksi antara pemimpin dan pengikut pada jawara menggambarkan pola hubungan *patrimonial*.

Seiring demokratisasi yang terjadi pasca reformasi 1998, daerah – daerah baru terus bermunculan yang diperkuat dengan lahirnya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi UU No 32 tahun 2004.

Salah satu daerah yang muncul dengan adanya peluang dari UU No 32 tahun 2004 ini yaitu lahirnya pemerintahan daerah Kota Serang yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Serang.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki hak – hak yang dijamin oleh undang – undang ini yaitu:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

<sup>1</sup> Partisipan adalah untuk menggambarkan bentuk perilaku politik yang menyadari orientasi output dan in put yang mereka peroleh. Sementara kaula adalah untuk menggambarkan perilaku actor politik yang tidak menyadari out put dan in put yang mereka peroleh (Abrori, 2003)

Sebagai bagian dari Propinsi Banten, citra Kota Serang masih lekat dengan citra Banten pada umumnya yaitu sebagai daerah yang masih tertinggal meskipun pembangunan sudah berjalan sejak disahkan sebagai propinsi tersendiri. Dalam pengalaman pribadi penulis, ketika memperkenalkan diri sebagai orang Banten, maka yang sering muncul adalah gambaran Banten sebagai daerah jawara, tempat orang belajar ilmu kesaktian seperti ilmu kebal, ilmu pelet dan ilmu hitam lainnya. Banten juga lebih dikenal sebagai daerah tempat tinggal orang Baduy. Dalam citra yang sangat negatif, Banten digambarkan sebagai daerah dimana penduduknya masih banyak yang makan "*sekul aking*".

Banten selama ini memang dikesankan oleh banyak orang sebagai daerah yang penuh dengan mistik, tertinggal dan "garang". Hal ini mungkin terjalin erat dengan banyaknya jawara di daerah ini. Padahal jika dilihat dari sejarah panjangnya maka Banten seharusnya juga dikenal sebagai daerah religius karena pernah menjadi kerajaan islam yang sangat besar dan terkenal serta memiliki pesantren yang sangat banyak. Namun citra daerah jawara sepertinya lebih dikenal daripada daerah santri.

Citra sebagai daerah tertinggal dan sebagai daerah jawara dengan konotasi negatifnya menjadi pekerjaan rumah yang harus hadapi oleh setiap pemimpin di Banten. Falah (2006) mengutip pernyataan salah seorang tokoh Lebak menyatakan bahwa siapapun gubernur Banten akan senantiasa menghadapi dua hal yaitu pembangunan dan kejawaraan.

Rivai (2003) menerangkan bahwa sejalan dengan adanya otonomi daerah, partisipasi masyarakat pun diharapkan meningkat. Tugas penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berada pada beban pemerintah daerah seperti kepala daerah dan DPRD semata melainkan juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Dengan demikian keterlibatan masyarakat menjadi sedemikian pentingnya sehingga berbagai macam kebijakan dapat menyentuh rasa keadilan ditengah masyarakat. Hal ini juga membuka peluang bagi para pemimpin lokal untuk berpartisipasi lebih luas lagi dalam perkembangan dan pembangunan daerah.



Para pemimpin lokal seperti Kyai dan Jawara dapat berperan sebagai pembuat kebijakan di pemerintahan yang baru maupun sebagai pihak yang mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintahan.

Peran keduanya masih terlihat pada saat Propinsi Banten pertamakali hendak didirikan dimana para Kyai (Ulama) dan Jawara turut mengerahkan masa untuk mendukung pembentukan Propinsi Banten. Sebelumnya, di era orde baru, dari catatan Sudiarti dalam thesis Ahmad Abrori (2003), para Kyai dan Jawara berperan dalam pemenangan salah satu partai politik dengan melakukan proses sosialisasi melalui pengajian – pengajian.

Masuknya pengaruh Kyai dan Jawara dalam berbagai kebijakan publik merupakan konsekuensi dari kedudukan mereka sebagai kelompok kepentingan yang dijelaskan oleh Winarno (2007) bahwa disamping para pembuat kebijakan yang resmi, didalam proses perumusan kebijakan terdapat partisipasi kelompok-kelompok tidak resmi yang salah satunya adalah kelompok kepentingan. Mereka disebut pemeran serta tidak resmi dalam perumusan kebijakan karena mereka tidak memiliki kewenangan yang sah untuk membuat keputusan yang mengikat tetapi mereka terlibat aktif dalam perumusan kebijakan.<sup>2</sup>

Winarno (2007) menjelaskan bahwa, peran serta kelompok kepentingan akan lebih meningkat pada sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini terjadi karena dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat dilindungi serta warga Negara lebih mempunyai keterlibatan dalam politik.<sup>3</sup>

Pengaruh kelompok kepentingan terhadap keputusan kebijakan salah satunya tergantung pada kecakapan dari orang yang memimpin kelompok tersebut. Dengan demikian, pengaruh seorang pemimpin, dalam hal ini Kyai dan Jawara, akan menentukan seberapa kuat kelompoknya dalam mempengaruhi berbagai kebijakan publik.

“Pengaruh kelompok kepentingan terhadap keputusan kebijakan tergantung pada berapa banyak factor yang menyangkut ukuran-ukuran

---

<sup>2</sup> Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses, MediaPressindo, Yogyakarta, 2007 hal 128

<sup>3</sup> ibid

keanggotaan kelompok, keuangan dan sumber-sumber lain, kepaduannya, kecakapan dari orang yang memimpin kelompok tersebut, ada tidaknya persaingan organisasi, tingkah laku para pejabat pemerintah dan tempat pembuatan keputusan dalam sistem politik".<sup>4</sup>

Keterlibatan Kyai dan Jawara dalam berbagai dinamika masyarakat juga dirasakan ketika pemilihan kepala daerah kota Serang diadakan. Tokoh-tokoh Kyai dan Jawara diyakini terlibat dalam pilkada. Terbukti dari adanya hubungan para calon walikota dan calon wakil walikota dengan kelompok Kyai dan Jawara.

Suhadi (2008) mengatakan bahwa ada benang merah yang menggambarkan situasi perpolitikan di Banten yaitu dengan hadirnya dominasi empat sub kultur yang ada di Banten yaitu jawara (pendekar), ulama (Kyai), cendekiawan dan pengusaha. Dari empat sub kultur itu, dominasi jawara dan ulama terlihat lebih menonjol. Lebih jauh Aris berpendapat bahwa, sulit bagi seseorang yang ingin menjadi kepala daerah tanpa menggandeng jawara dan ulama. Bahkan pengaruh jawara dan ulama sering mengalahkan peran partai politik dalam member warna politik local di Banten.<sup>5</sup>

Tihami (2008) juga berpendapat bahwa bakal calon kepala daerah harus mendapatkan legitimasi dari Jawara dan ulama mengingat kedudukan mereka sebagai figur-figur sentral di Banten.<sup>6</sup>

Kota Serang mengadakan pemilihan kepala daerah pertamanya pada tahun 2008 yang dipilih langsung oleh masyarakatnya. Pemilihan kepala daerah secara langsung di Kota Serang ini menjadi pemilihan kepala daerah pertama dimana calon independen secara resmi boleh ikut sebagai calon walikota dan calon wakil walikota.

Dengan pendidikan yang memungkinkan masyarakatnya hidup lebih modern dan berpikir rasional, maka pengaruh kepemimpinan Kyai

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup> Bayang-bayang jawara dan ulama dalam pilkada langsung di banten, <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0501/15/daerah/1500855.htm>, diakses 30 April 2009 jam 06:01

<sup>6</sup> ibid

dan Jawara di Kota Serang sangat mungkin untuk berubah ditambah lagi dengan dinamika demokrasi di Indonesia yang memungkinkan hadirnya banyak partai dan ikut sertanya calon independen dalam pemilihan kepala daerah.

Dengan latar belakang tersebut, maka praktik dan pengaruh kepemimpinan Kyai dan Jawara dalam Pilkada Kota Serang menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam sehingga kepemimpinan kyai dan Jawara dapat terlihat eksistensinya pada masyarakat disaat pemilihan kepala daerah dilaksanakan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian mengenai Kyai dan Jawara memang sudah mulai banyak dilakukan, namun penelitian ini berusaha menggali lebih dalam mengenai Kyai dan Jawara dalam hal praktik dan pengaruh kepemimpinannya. Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah praktik dan pengaruh kepemimpinan Kyai dalam PILKADA Kota Serang
2. Bagaimanakah praktik dan pengaruh kepemimpinan Jawara dalam PILKADA Kota Serang

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Para peneliti sebelumnya yang melakukan kajian terhadap Kyai dan Jawara, dilakukan sebelum terbentuknya Kota Serang dan sebelum terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan dimana seorang kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakatnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai:

1. Praktik dan pengaruh kepemimpinan Kyai dalam pemilihan kepala daerah Kota Serang
2. Praktik dan pengaruh kepemimpinan Jawara dalam pemilihan kepala daerah Kota Serang

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan studi dan kajian kepemimpinan terutama tentang praktik kepemimpinan kyai dan jawara dalam pemilihan kepala daerah
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pengelola pemerintahan untuk mewujudkan sinergitas antara pemimpin formal dan informal dalam mewujudkan berbagai macam tujuan yang menjadi semangat diberlakukannya otonomi daerah

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Penelitian ini berusaha mengkaji mengenai praktik kepemimpinan Kyai dan Jawara sehingga bahasan penelitian ini lebih difokuskan untuk mengetahui bagaimana kyai dan jawara sebagai pemimpin menjalankan peranya dalam pemilihan kepala daerah Kota Serang.

Praktik kepemimpinan dalam penelitian ini adalah cara-cara yang diterapkan oleh Kyai dalam mempengaruhi para pengikutnya sementara pengaruh kepemimpinan merupakan dampak yang timbul kepada para pengikutnya dari adanya praktik kepemimpinan yang dijalankan oleh Kyai dan Jawara.

Penelitian ini tidak masuk kedalam wilayah penilaian benar dan salah terhadap perilaku kyai dan jawara maupun terhadap keputusan politik kyai dan jawara dalam mendukung atau tidak mendukung pilihan-pilihan politik mereka.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN LITERATUR

Penulis mencoba melakukan tinjauan literatur pada bab ini dengan dasar teoritik yang disusun meliputi berbagai konsep terkait peran, kepemimpinan, otonomi daerah, kyai dan jawara. Juga akan mencoba menguraikan secara ringkas mengenai gambaran lokasi penelitian mulai dari sejarah hingga perkembanganya terkait dengan objek penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi pendekatan penelitian, data dan sumber data dalam penelitian, pengolahan data dan tahapan penelitian.

## BAB IV PEMBAHASAN

Temuan-temuan yang didapatkan dalam pengumpulan data akan coba dianalisa dengan terlebih dahulu menetapkan batas-batas penelitian, mengumpulkan informasi melalui pengamatan wawancara, dokumen dan bahan-bahan visual dari informan. Kemudian data dianalisa dengan membuktikan keabsahan data yakni membandingkan jawaban seorang informan dengan informan lainnya terkait dengan permasalahan yang sama dan dicocokkan dengan hipotesis penelitian.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab VI dibagi menjadi 2 (dua) Sub Bab yakni *pertama*, Kesimpulan yang berisi kesimpulan mengenai analisa permasalahan yang telah dituangkan pada pertanyaan penelitian ini dan kemudian diakhiri dengan Sub Bab *kedua* yang berisi saran dan rekomendasi dari penelitian ini.

## BAB II Landasan Teori

### 2.1 Peran Kepemimpinan Kyai dan Jawara

Ketika seorang manusia dilahirkan, ia hidup dalam sebuah lingkungan yang terorganisir. Manusia yang satu saling berinteraksi dengan manusia lain dalam sebuah sistem. Masyarakat dapat dipandang terdiri dari seperangkat posisi-posisi sosial. Posisi sosial ini dinamakan status. Didalam sistem tersebut manusia menata posisi dan peranya dalam masyarakat.

Menurut Linton (1956) peran ialah “the dynamic aspect of status” (aspek dinamis dari suatu status). Suatu peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status tertentu.

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. (Kozier Barbara, 1995:21).

Menurut Soekanto (2007) peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Antara peranan dan kedudukan tidak dapat dipisahkan karena satu dengan lainnya saling memiliki ketergantungan. Seseorang dikatakan menjalankan suatu peranan apabila ia telah melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukanya.

Gross, Mason dan Mc Eachen dalam tulisanya *explorations in Role Analysis* mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan – harapan tersebut merupakan imbalan dari norma – norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan – peranan itu ditentukan oleh norma – norma dalam masyarakat.

Didalam peranan terdapat 2 (dua) macam harapan yaitu harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban – kewajiban dari pemegang peran dan harapan – harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang – orang yang berhubungan denganya dalam menjalankan peranya.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pentingnya peranan bagi suatu masyarakat adalah karena ia mengatur perilaku seseorang yang sekaligus juga pada batas-batas tertentu dapat menjadi sumber dalam meramalkan perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan diri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Peranan menurut Levinson mungkin mencakup tiga hal:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Menurut Soekanto (1982), di Indonesia terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan. Hal ini menurutnya disebabkan karena adanya kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialism ketimbang spiritualisme. Nilai materialism dalam kebanyakan hal diukur pada atribut-atribut atau cirri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah seperti gelar, tanda kehormatan, rumah yang mewah, kendaraan, seragam dan lain sebagainya.

Kyai dan Jawara merupakan status sosial yang dimiliki oleh seseorang dimana pada dirinya melekat berbagai peran. Salah satu peran yang dimiliki oleh Kyai dan Jawara adalah peran sebagai pemimpin ditengah-tengah masyarakat. Karena kedudukannya berada diluar struktur resmi pemerintahan, maka Kyai dan Jawara dapat dikategorikan sebagai pemimpin informal.

## 2.2 Kepemimpinan Kyai dan Jawara

Mosca (dalam Varma, 2001:202-203) mengatakan bahwa dalam semua masyarakat, dari yang paling giat mengembangkan diri serta telah mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat, selalu muncul dua kelas dalam masyarakat, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang pertama biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, sedang kelas yang kedua, yang jumlahnya lebih banyak, dipimpin dan diawasi oleh kelas pertama, dalam cara yang kadang-kadang bersifat legal, kadang-kadang arbitrer dan menggunakan kekerasan.

Putnam mengemukakan azas-azas umum tentang elit (Mas'ood dan McAndrews, 1993: 78-79):

1. Pada hakikatnya, orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik penting dan mereka yang tidak memilikinya.
2. Secara internal, elit itu bersifat homogen, bersatu, dan memiliki kesadaran kelompok
3. Elit itu mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan keanggotaannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang sangat terbatas
4. Kelompok elit pada hakikatnya bersifat otonom, kebal dari gugatan dari siapapun diluar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya.

Kyai dan Jawara merupakan elit sosial yang terdapat dalam sistem sosial pada masyarakat Banten.<sup>1</sup> Dengan kedudukannya tersebut, Kyai dan jawara menjelma menjadi seorang pemimpin ditengah-tengah masyarakat Banten. Kepemimpinan kyai dan jawara bahkan diakui meluas bukan hanya dipesantren dan perguruan silat sebagai wilayah kepemimpinannya namun juga kepada masyarakat disekitarnya.

Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam

<sup>1</sup> Tasbih dan Golok: Studi tentang Kedudukan Kyai dan Jawara di Banten



menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung kepada kewibawaan, dan juga pimpinan itu dalam menciptakan motivasi dalam diri setiap orang bawahan, kolega, maupun atasan pimpinan itu sendiri (<http://id.wikipedia.org/wiki/kepemimpinan>).

Kepemimpinan menurut Locke (1991) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah proses membujuk orang lain agar supaya melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu Hersey dan Blanchard (1982) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang ditampilkan ketika mencoba mempengaruhi tingkah laku orang lain seperti yang dipersepsikan oleh orang yang akan kita pengaruhi tersebut. Oleh karena itu segala sesuatu yang menyangkut kepemimpinan secara khusus dan masalah kepribadian secara umum merupakan hal yang lebih membutuhkan contoh dibanding teori.

Kepemimpinan (leadership) menurut Soekanto (1990) adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain yaitu pengikut sehingga orang lain tersebut berperilaku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut.

Ada perbedaan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai proses sosial. Kepemimpinan sebagai kedudukan merupakan kompleks dari hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang dapat dimiliki seseorang atau badan. Sedangkan sebagai proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.

Dalam proses interaksi manusia berikutnya seiring dengan perkembangan sistem organisasi Pemerintahan telah memunculkan adanya organisasi formal dan informal yang juga mengakibatkan adanya kepemimpinan formal dan informal. Pemimpin formal ialah orang yang oleh organisasinya/lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran organisasi (Kartono,1994). Sedangkan pemimpin informal ialah orang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi spikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.

Soekanto (1982) membedakan kepemimpinan menjadi dua hal yaitu kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Kepemimpinan informal yaitu kepemimpinan yang tersimpul dalam suatu jabatan sementara kepemimpinan informal yaitu kepemimpinan yang ada karena pengakuan masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan.

Perbedaan yang mencolok antara kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal menurut Soekanto (1982) yaitu kepemimpinan resmi didalam pelaksanaanya selalu harus berada diatas landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi sehingga daya cakupnya agak terbatas. Kepemimpinan informal, mempunyai ruang lingkup tanpa batas-batas resmi karena didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Ukuran benar atau tidaknya kepemimpinan tidak resmi terletak pada sejauhh mana tujuan dan hasil pelaksanaan kepemimpinan tersebut menguntungkan atau merugikan masyarakat.

Kartodirjo (1984) menyatakan bahwa masyarakat saling berinteraksi satu dengan lainnya. Interaksi tersebut menandakan adanya peranan yang berbeda antar anggota masyarakat yang pada giliranya membentuk organisasi sosial. Sebagai perwujudan pengorganisasian tersebut lalu secara wajar lahir dua golongan yang berbeda yaitu segolongan kecil yang hadir sebagai pemimpin dan golongan kebanyakan yang berperan sebagai pengikut.

Menurut Soekanto (1982), tugas-tugas pokok seorang pemimpin adalah sebagai berikut:

1. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya
2. Mengawasi, mengendalikan serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinya
3. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia diluar kelompok yang ia pimpin

Suatu kepemimpinan dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan berbagai cara. Soekanto (1982) membagi metode tersebut kedalam beberapa kategori:

1. Cara-cara Otoriter

Cara-cara otoriter memiliki cir-ciri umum sebagai berikut:

- a. Pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak
- b. Pengikut sama sekali tidak diajak untuk ikut serta merumuskan tujuan kelompok dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut
- c. Pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut dalam proses interaksi didalam kelompok tersebut

2. Cara-cara Demokratis

Cara-cara demokratis memiliki cirri-ciri umum sebagai berikut:

- a. Secara musyawarah dan mufakat pemimpin mengajak warga atau anggota kelompok untuk ikut serta merumuskan tujuan-tujuan yang harus dicapai kelompok serta cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut
- b. Pemimpin secara aktif memberikan saran-saran dan petunjuk
- c. Ada kritik positif baik dari pemimpin maupun pengikut-pengikut
- d. Pemimpin secara aktif ikut berpartisipasi didalam kegiatan-kegiatan kelompok

3. Cara-cara Bebas

Cara-cara bebas memiliki cirri-ciri pokok sebagai berikut:

- a. Pemimpin menjalankan peranya secara pasif
- b. Penentuan tujuan yang akan dicapai kelompok sepenuhnya diserahkan kepada kelompok
- c. Pemimpin hanya menyediakan sarana yang diperlukan kelompok
- d. Pemimpin berada ditengah-tengah kelompok namun dia hanya berperan sebagai penonton.

Masyarakat Banten merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan dikenal sebagai masyarakat yang taat menjalankan agamanya. Bahkan dalam sejarahnya, Banten pernah menjadi pusat kerajaan islam di tanah Jawa. Dengan latar belakang sejarah dan masyarakatnya tersebut, posisi kyai bukan hanya sekedar dipandang sebagai tokoh

agama namun juga sebagai pemimpin masyarakat. Kekuasaannya seringkali melebihi para pemimpin formal. Selain kyai, tokoh yang juga memiliki pengaruh cukup luas yaitu Jawara. Kemampuannya dalam memainkan jurus-jurus serta memanipulasi kekuatan spiritual membuat sosok jawara cukup berpengaruh di tengah masyarakat Banten. (Michrab, 1993)

Kepemimpinan dalam penelitian ini yaitu tentang pengaruh Kyai dan jawara ditengah – tengah masyarakat Kota Serang dengan mengambil batasan waktu pada proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Serang.

### 2.3 Kepemimpinan Kyai

Ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas memeluk agama islam, seorang ulama atau kyai merupakan salah satu elit yang menempati kedudukan terhormat dan berpengaruh. Faridi (2007) menyebutkan bahwa kyai menjadi salah satu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat ditengah masyarakat. Kedudukan Kyai sebagai elit strategis disebabkan karena factor ketokohnya sebagai figure yang memiliki pengetahuan agama islam yang luas dan mendalam. Selain itu, secara teologis Kyai dipandang sebagai pewaris para nabi (waratsat al anbiya). Dengan kedudukan ini, kyai menjadi sumber legitimasi tidak hanya dalam hal keagamaan namun juga dalam berbagai bidang kehidupan.

Hamid (2008) mengemukakan Kyai pada umumnya dipakai untuk penyebutan beberapa kategori:

1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat
2. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya
3. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajarkan kitab-kitab islam klasik kepada para santrinya

Untuk menjadi kyai tersohor, menurut Vredenbergt dalam Ismanpratama (1993:57), ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi:

1. Keturunan. Seorang Kyai yang berasal dari keturunan kyai-kyai besar atau memiliki ikatan kekeluargaan dengan kyai-kyai besar akan lebih tersohor
2. Pengetahuan tentang islam. Makin berilmu seorang kyai makin besar pula gengsinya.
3. Jumlah murid. Kyai yang penting senantiasa mempunyai murid dalam jumlah besar, yang memilihnya sebagai pemimpin spiritual, khususnya karena pengetahuannya yang mendalam.
4. Pelayanannya kepada masyarakat. Kyai yang penting adalah tempat sandaran masyarakat, seorang tokoh kharismatis yang dapat mengharapakan kesetiaan dan kekaguman masyarakat.

Keberadaan Kyai, tidak dapat dilepaskan dari sebuah tempat bernama pesantren. Menurut struktur bahasa Indonesia, kata pesantren menunjukkan sebuah tempat. Yaitu tempat yang digunakan untuk mengajar dan mendidik para santri yang hendak mempelajari dan mempelajari ilmu-ilmu agama islam. Pesantren sendiri merupakan kata yang dibentuk dari kata dasar santri. Menurut Bull (2000) sebagaimana dikutip oleh Purwadi dan Siregar dalam makalahnya, pesantren berasal dari kata pe-santri-an atau tempat para santri. Pesantren merupakan sekolah islam berasrama yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan agama islam, khususnya melalui studi bahasa arab, tradisi penafsiran, hadits nabi, hukum dan logika<sup>2</sup>

Zamakhsyari Dhofier (1994) menerangkan kata Santri menurut beberapa peneliti memiliki asal-usul kata yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru ngaji. Adapula yang berpendapat bahwa kata santri berasal dari kata shastri yang berarti orang yang tahu dan memahami kitab suci agama Hindu.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Ronald Lukens-Bull, "Teaching Morality: Javanese Islamic Education in a globalizing era", *Journal of Arabic and Islamic Studies*, Vol 3, 2000, p.48 dalam makalah Slamet Johannes Purwadi dan Ferry Muhammadiyah Siregar, "Pesantren dan Tantangan Modernitas di Indonesia",

<sup>3</sup> Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A., (2004), *Paradigma kebudayaan islam*, Mitra Cendekia, hal 94

Para santri diberikan pelajaran dan bimbingan oleh para Kyai dimasjid maupun ditempat-tempat yang tersedia dalam pesantren tersebut. Jadi, pesantren merupakan sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan sekitarnya. Dalam kompleks tersebut terdapat beberapa buah bangunan yaitu rumah kediaman pengasuh, Surau atau masjid, tempat pengajaran yang dalam bahasa arab disebut madrasah dan pemondokan tempat para santri menginap. Didaerah jawa, para pengasuh umumnya disebut kyai, didaerah sunda biasanya disebut ajengan, sementara dimadura biasa disebut Nun atau Bendera.<sup>4</sup>

Dengan demikian, keberadaan Kyai pada umumnya tidak terlepas dari pesantren tempat para Kyai mengajarkan berbagai ilmu terutama ilmu-ilmu agama kepada para santrinya. Metode yang biasa dipakai oleh Kyai untuk mengajarkan kitab kuning yaitu menggunakan metode sorogan dan weton. Pelajaran utama dan pertama yang diberikan oleh para Kyai didalam pesantren adalah bahasa arab dengan segala seluk beluknya (nahwu, sharaf dan ilmu balaghah), karena dengan penguasaan bahasa arab yang baik, para santri akan bias mengupas dan membahas kitab-kitab klasik yang tidak memakai syakal (kitab-kitab gundul). Pelajaran – pelajaran lain yang diberikan oleh para Kyai yaitu ilmu kalam, fiqih dan ushul fiqih, tafsir, hadits, tasawuf dan tarikh (sejarah islam). Kitab-kitab fiqih yang biasa dipakai diantaranya yaitu *Fathul Qarib Syarh Natan Taqrib* (Ibnu Qasim Al Ghazi), *Minhajut Thaalibin* (An Nawawi) dan lain sebagainya.

Jadi, Kyai merupakan salah satu elemen dasar dari keberadaan sebuah pesantren. Elemen lainya dari keberadaan sebuah pesantren yaitu pondok (tempat tinggal santri), masjid, santri dan pengajian kitab-kitab klasik.

Pada kenyataanya, para kyai memiliki beragam kecondongan dalam menjalankan peranya ditengah-tengah masyarakat sehingga sebutan kyai pun tidak hanya ditujukan pada mereka yang membimbing santri-santrinya didalam pesantren. Mas'ud (2004, 236-237) memasukkan kyai kedalam lima tipologi:<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Lihat Abdurrahman Wahid (2001), Menggerakkan tradisi , esai-esai pesantren, LKiS, hal 2

<sup>5</sup> Haedar Ruslan, Dinamika Kepemimpinan Kyai di pesantren, <http://re-searchengines.com/0607arlan.html>, diakses 30 April 2009 jam 05:37 WIB

1. Kyai (ulama) *encyclopedi* dan multidisipliner yang mengkonsentrasikan diri dalam dunia ilmu; belajar, mengajar, menulis, dan menghasilkan banyak kitab seperti Nawawi Al Bantani
2. Kyai yang ahli dalam salah satu spesialisasi bidang ilmu pengetahuan Islam. Karena keahlian mereka dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan, pesantren mereka terkadang dinamai sesuai dengan spesialisasi mereka, misalnya pesantren al-Qur'an.
3. Kyai kharismatik yang memperoleh kharismanya dari ilmu pengetahuan keagamaan, khususnya dari sufismenya, seperti KH. Kholil Bangkalan Madura.
4. Kyai Dai keliling, yang perhatian dan keterlibatannya lebih besar melalui ceramah dalam menyampaikan ilmunya sebagai bentuk interaksi dengan publik bersamaan dengan misi sunnisme atau aswaja dengan bahasa retorikal yang efektif
5. Kyai pergerakan, karena peran dan skill kepemimpinannya yang luar biasa, baik dalam masyarakat maupun organisasi yang di dirikannya,serta kedalaman ilmu keagamaan yang dimilikinya, sehingga menjadi pemimpin yang paling menonjol seperti KH. Hasyim Asy'ari

Penelitian yang dilakukan oleh LP3ES tahun 1972-1973 di Daerah Bogor, muncul beberapa temuan diantaranya bahwa kepemimpinan formil pesantren dipegang oleh seorang kyai. Maju atau mundurnya sebuah pesantren sangat bergantung pada kredibilitas moral dan kemampuan manajerial kyainya. Pada umumnya kepemimpinan di pesantren menganut kepemimpinan kharismatik dan tidak menganut kepemimpinan rasional. (Sudjoko Prasodjo, 1975)<sup>6</sup>

Menurut Rozaki (2004, 87-88) kharisma yang dimiliki kyai merupakan salah satu kekuatan yang dapat menciptakan pengaruh dalam masyarakat. Ada dua dimensi yang perlu diperhatikan. *Pertama*, kharisma yang diperoleh oleh seseorang (kyai) secara *given*, seperti tubuh besar, suara yang keras dan mata yang tajam serta adanya ikatan *genealogis*

---

<sup>6</sup> ibid

dengan kyai kharismaik sebelumnya. *Kedua*, kharisma yang diperoleh melalui kemampuan dalam penguasaan terhadap pengetahuan keagamaan disertai moralitas dan kepribadian yang saleh dan kesetiaan menyantuni masyarakat.<sup>7</sup>

Posisi kepemimpinan kyai di pesantren lebih menekankan pada aspek kepemilikan saham pesantren dan moralitas serta kedalaman ilmu agama dan sering mengabaikan aspek manajerial. Keumuman kyai, bukan hanya sekedar pimpinan tetapi juga sebagai sebagai pemilik pesantren. Posisi kyai juga sebagai pembimbing para santri dalam segala hal, yang pada gilirannya menghasilkan peranan kyai sebagai peneliti, penyaring dan akhirnya simulator aspek-aspek kebudayaan dari luar, dalam keadaan seperti itu dengan sendirinya menempatkan kyai sebagai *kultural brokers* (agen budaya). (Dawam Rahajo, 1995: 46-47)<sup>8</sup>

Dhofier (1985) dalam kesimpulannya berpendapat bahwa peranan kyai-kyai di Jawa merupakan sektor kepemimpinan Islam yang paling dominan dan selama berabad-abad telah memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan sosial, kultural, keagamaan dan politik. Para kyai dianggap sebagai salah satu kelompok pimpinan yang menonjol dalam memenuhi kebutuhan akan pemimpin moral bagi bangsa Indonesia.

Pada banyak kasus, peran kyai dalam masyarakat pedesaan tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang menyangkut keagamaan (Kuntowidjojo, 1991:53). Di tengah kebudayaan yang didominasi ketokohan kyai, berbagai masalah sehari-hari menyangkut urusan rumah tangga, perjodohan, perekonomian, bahkan pengobatan sering menempatkan kyai sebagai tumpuan. Hal ini tentu saja melahirkan hubungan emosional yang diliputi ketergantungan dengan tingkat kepercayaan yang tidak perlu dipertanyakan. Masyarakat Islam di sekitar kyai dengan sendirinya akan senantiasa berusaha menyesuaikan pandangan hidup dan perilakunya dengan ketokohan kyai. Kyai menjadi pemimpin informal yang lebih didengar petuah dan keputusannya dibanding tokoh manapun.

---

<sup>7</sup> ibid

<sup>8</sup> ibid



Peran besar kepemimpinan Kyai di Indonesia, terutama di Jawa, ditegaskan oleh Suryo (2000). Ia mengatakan bahwa :

‘Baik Geertz, Brenda, maupun para ahli Islam di Jawa lainnya, sependapat bahwa tradisi santri dan kepemimpinan kyai atau ulama merupakan unsure kebudayaan Islam-Jawa yang memiliki pengaruh besar terhadap dinamika kehidupan agama, sosial dan politik dalam masyarakat Jawa dan Indonesia. Kecenderungan ini berlangsung secara berkelanjutan dari masa tradisional sampai dengan masa kolonial dan masa Indonesia merdeka’.

Pengaruh besar dari keberadaan santri dan kyai ini disebabkan karena santri dan kyai bukan hanya menjadi segmen sosio-kultural tetapi juga menjadi basis sosial-politik di Indonesia khususnya di Jawa. Secara historis, eksistensi santri dan kyai dalam sosial-politik Indonesia telah ada sejak pendirian kerajaan Islam Demak, Cirebon hingga kerajaan Islam Banten.<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya memang kita dapat menemui bahwa para Kyai tidak sekedar berada dalam wilayah-wilayah moral dengan menjadi guru agama atau mengisi majelis-majelis ta’lim namun juga sudah merambah dalam wilayah politik bahkan dalam wilayah politik yang lebih praktis lagi dengan terlibat sebagai pendiri dan pengurus partai politik, menjadi anggota legislatif bahkan menjadi kepala daerah sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Tuan Guru Bajang yang menjadi Gubernur NTB.

Peran kyai dalam masyarakat Banten secara historis memiliki akar yang sangat panjang. Hal ini dikarenakan sejarah awal pendirian Banten sebagai kerajaan Islam yang terbesar di zamannya tidak pernah bisa dilepaskan dari dua orang Kyai yang sangat berpengaruh yaitu Syarif Hidayatullah dan puteranya Maulana Hasanuddin. Kedua orang tokoh ini merintis kerajaan Islam Banten dengan motif keagamaan yang kental. Michrob dan Chudari (1993) bahkan mengatakan bahwa berdirinya kerajaan Islam Banten didahului dengan motif penyebaran agama dan menolak kehadiran Portugis yang gigih menghancurkan Islam dalam semangat perang salib.

Pada masa berikutnya, peran kyai masih terlihat kuat dengan penempatan kyai dalam birokrasi kerajaan. Posisi yang dipegang oleh Kyai yaitu sebagai seorang *Kadhi*

<sup>9</sup> Makalah Prof. Dr. Joko Suryo, “Tradisi Santri Dalam Historiografi Jawa: Pengaruh Islam Di Jawa”, 2000

(Hakim Agung). *Kadhi* memiliki kedudukan sebagai orang yang dimintakan pendapatnya sebelum penguasa kerajaan mengambil keputusan-keputusan penting. Pada saat kerajaan Banten dipegang oleh pewaris kerajaan yang masih kecil bernama Sultan Muhammad, *Kadhi* menjadi wali sultan dan penasehat pengangkatan pengganti sultan. Dalam keadaan genting sebagaimana yang terjadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, *Kadhi* atau dikenal juga dengan sebutan *Faqih Najmuddin* berperan sebagai panglima perang disamping jabatannya sebagai pemimpin keagamaan.<sup>10</sup>

Jadi sejak awal pendirian kerajaan Banten hingga pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, posisi dan peran kyai sangat strategis dalam pemerintahan kerajaan Banten. Para penguasa selalu bergabung dengan para ulama (Kyai) sehingga berbagai kebijakan penguasa mendapat dukungan dari rakyat.

Peran kepemimpinan para kyai mulai dilemahkan ketika Belanda mengenalkan sistem kolonial yang memisahkan masalah – masalah keagamaan dengan masalah-masalah pemerintahan. Meskipun peran kepemimpinan kyai dalam pemerintahan kerajaan mulai dilemahkan, namun kedudukan para kyai sebagai tokoh masyarakat tidak memudar, terbukti dengan adanya berbagai macam pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat terhadap penjajahan Belanda yang dipimpin secara tidak langsung maupun secara langsung oleh Kyai semisal pemberontakan yang dilakukan oleh “Bajolaut” di Teluk Merica dan di muara Cibungur yang menentang sistem tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda juga pemberontakan yang sangat terkenal di tahun 1888 yang dipimpin langsung oleh para kyai. Pemberontakan yang dipimpin oleh para kyai diantaranya yaitu Haji Abdul Karim, Haji Tubagus Ismail, Haji Marjuki dan H. Wasid ini lebih dikenal dengan peristiwa “Geger Cilegon”.

Berbagai pemberontakan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Banten karena semangat jihad yang dikobarkan oleh para Kyai. Para kyai senantiasa menanamkan nilai-nilai kepada rakyat bahwa penjajahan yang dilakukan oleh kolonial bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai yang diajarkan oleh agama islam. Dengan nilai perjuangan ini, rakyat dipahamkan bahwa perjuangan menentang penjajahan merupakan perbuatan mulia dan wajib dilakukan setiap orang islam dan bahwa mencintai

<sup>10</sup> Halawany Michrab dan A. Mudjahid Chudari, “Masa Lalu Banten”, Saudara, Serang, 1993

tanah air adalah sebagian dari iman. Karenanya apabila seorang muslim mati dalam perjuangan maka ia mati dalam keadaan mati syahid karenanya berhak memperoleh surga.

Maraknya pemberontakan oleh rakyat yang dipelopori oleh para Kyai bahkan digambarkan oleh Kartodirdjo sebagaimana dikutip Michrab dan Chudori (1993) bahwa Banten sepanjang Abad 19 merupakan tempat persemaian “kerusuhan” dan “pemberontakan”. Hampir tidak ada satu distrik pun di Banten yang sepi dari perlawanan rakyat menentang penjajahan.<sup>11</sup>

Semangat menentang penjajahan tidak hanya berasal dari para kyai yang berada di Banten namun juga para kyai yang bermukim di Mekah atau dikenal dengan sebutan “Masyarakat Jawah”. Salah seorang *Jawah* yang berpengaruh asal banten yaitu bernama Syaikh Nawawi Albantani yang merupakan guru dari Haji Wasid.<sup>12</sup>

Para kyai mendirikan dan menggunakan pesantren sebagai tempat untuk menjaga rakyat dari pengaruh-pengaruh ajaran agama dan kebudayaan yang dibawa oleh penjajah. Pesantren juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai kecintaan kepada agama dan pembelaan kepada negara<sup>13</sup>

Pada masa sebelum kemerdekaan, situasi politik Indonesia diwarnai oleh semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan. Berbagai organisasi berdiri dengan berbagai macam latar belakang motif pendirian dan sasaran pergerakan namun memiliki semangat anti penjajahan yang sama. Organisasi – organisasi pemersatu awal diantaranya yaitu Sarekat Islam dan Budi Oetomo. Di Banten, kehadiran Sarekat Islam disambut baik oleh kalangan kyai. Hampir seluruh ulama berhimpun dalam persyarekatan. Pada saat

<sup>11</sup> Lebih jauh lihat Kartodirdjo (1984:45)

<sup>12</sup> Syaikh Nawawi Albantani menurut tradisi merupakan keturunan langsung dari Pangeran Sunyararas. Pangeran Sunyararas sendiri merupakan putra dari Sultan Maulana Hasanudin. Syaikh Nawawi Albantani belajar agama pertamakali dari ayahnya yang bernama KH. Umar di daerah asalnya di Tanara, Tirtayasa. Sepuluh tahun kemudian, setelah ayahnya meninggal, Nawawi melanjutkan belajar pada K.H. Sahal, seorang ulama terkenal di daerah Banten. Kemudian bertiga dengan saudaranya (Tamim dan Ahmad), mereka pergi ke Purwakarta untuk belajar pada Raden Haji Yusuf. Pada usia yang masih muda, tiga bersaudara itu pergi ke Mekah untuk memperdalam ilmu keislamannya. Selama 30 tahun (1830 - 1860) Nawawi pun belajar pada Khatib Sambas, Abdul Ghani Bima, Yusuf Sambulawesi, Nahrawi dan Abdul Gani Daghestani di Mekah. Selanjutnya, Syekh Nahrawi belajar pada Syekh Dimiyati dan Muhammad Dahlan Khatib al-Hambali di Madinah (Hafifuddin, 1987: 40). Dari ilmu-ilmu yang diperolehnya di perantauan ini, ia banyak menulis buku yang antara lain 115 buah judul yang sudah diterbitkan dalam bahasa Arab, dalam berbagai bidang ilmu. Dari prestasi keilmuannya ini Nawawi digelari *Ulama al-Hijaz, Imam Ulama al-Haramain*. Murid lainnya dari Syaikh Nawawi Albantani yaitu K.H Khalil (Madura), K.H Hasyim Asyhari (Jombang), K.H Tb Asnawi (Caringin)

<sup>13</sup> Halawany Michrab dan A. Mudjahid Chudari, “Masa Lalu Banten”, Saudara, Serang, 1993

pendudukan Jepang, penjajah mendirikan sebuah satuan militer yang diberi nama tentara Pembela Tanah Air (PETA). Para Kyai pun banyak yang bergabung didalamnya.

Dengan demikian maka peran kepemimpinan kyai bukan hanya dilegitimasi oleh masyarakat namun juga oleh sejarah berkat perannya yang mengiringi perjuangan masyarakat sejak zaman kerajaan, zaman kemerdekaan hingga saat ini.

#### 2.4 Kepemimpinan Jawara

Jawara dalam percakapan sehari-hari masyarakat Banten merujuk kepada seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan fisik dalam bersilat dan mempunyai ilmu-ilmu kesaktian (*kadigayaan*), seperti kekebalan tubuh dari senjata tajam, bisa memukul dari jarak jauh dan sebagainya, sehingga membangkitkan perasaan orang lain penuh dengan pertentangan: hormat dan takut, rasa kagum dan benci. Berkat kelebihanannya itu, ia bisa muncul menjadi tokoh yang kharismatik, terutama pada saat-saat kehidupan sosial mengalami krisis.<sup>14</sup>

Hudaeri (1993) mengemukakan peranan yang dimainkan oleh jawara lebih cenderung kepada pengolahan kekuatan fisik dan “batin”. Sehingga dalam masyarakat Banten peran-peran tradisional yang sering dimainkan para jawara adalah menjadi jaro (kepala desa atau lurah), guru ilmu silat dan ilmu “batin” atau magi, satuan-satuan pengamanan. Namun demikian peranan para jawara dalam sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan masyarakat Banten saat ini mengalami peningkatan dibandingkan di masa lalu.

Jaringan tradisional yang dibangun kelompok jawara adalah dengan mengandalkan hubungan kedekatan emosional yang dalam. Sehingga jaringan yang terbentuk pun melalui hubungan kekerabatan, baik melalui hubungan nasab atau perkawinan, hubungan guru dengan murid, lembaga sosial-keagamaan seperti perkumpulan pesantren atau perguruan.

Adanya kedudukan, peran dan jaringan sosial yang dimiliki oleh kelompok jawara, membentuk kultur tersendiri yang agak berbeda dengan kultur dominan masyarakat Banten. Jawara telah membentuk subkultur tersendiri, yang memiliki nilai,

<sup>14</sup> Mohammad Hudaeri, *Tasbih dan Golok: Kedudukan dan Peran Kyai dan Jawara di Banten*, 2002

norma dan pandangannya tersendiri, yang dijadikan landasan mereka dalam melakukan tindakan-tindakan sosial.

Mengenai asal-usul kemunculan jawara ditengah-tengah masyarakat, Miftahul (2006) mencoba menguraikan beberapa kemungkinan asal-usul jawara ditengah masyarakat Banten meskipun belum ada kesepakatan yang tegas diantara para ahli sejarah.

Pertama, *jawara* itu sebenarnya sudah ada ketika daerah Banten masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada waktu itu, terdapat sekelompok masyarakat yang berkedudukan sebagai perantara atau penghubung raja dengan rakyatnya. Mereka bertugas melayani raja, membela sesama dan melindungi para pengikutnya. Meskipun demikian, kelompok masyarakat ini lebih banyak melayani raja daripada membela sesama dan melindungi para pengikutnya. Kelompok masyarakat ini memiliki gaya hidup yang mencerminkan bahwa dirinya seorang jagoan dalam menyabung ayam, terampil dalam bersilat, dan memiliki ilmu kekebalan (sakti). Dalam perkembangan selanjutnya, keterampilan bermain silat dan kekebalan tubuh yang dimilikinya menjadi ciri utama kelompok ini sehingga melahirkan sebutan *jawara*.<sup>15</sup>

Kedua, ada yang mengatakan bahwa kelompok *jawara* itu muncul seiring dengan berdirinya Kesultanan Banten. Kelompok ini lahir sebagai bagian dari strategi Maulana Hasanudin dalam usahanya merebut Pakuan Pajajaran, pusat kekuasaan Kerajaan Sunda. Untuk maksud ini, Maulana Hasanudin kemudian merekrut pemuda Islam yang memiliki militansi sangat tinggi yang dipimpin oleh Pangeran Yusuf, (Putra Mahkota Kesultanan Banten). Kelompok pemuda militan ini merupakan pasukan khusus yang mampu bergerak cepat tanpa membawa nama Kesultanan Banten yang bertugas untuk menghancurkan pusat Kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran. Selain itu, pasukan khusus ini pun bertugas untuk memadamkan berbagai kerusuhan yang dilakukan oleh tentara atau orang-orang Pajajaran, yang sering terjadi di perbatasan negeri. Sifat militan yang dimiliki oleh pasukan khusus ini menumbuhkan sifat pemberani yang kemudian dibina secara terus menerus. Dari merekalah kemudian lahir kaum *jawara*.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Lihat Adimiharja, 1991

<sup>16</sup> Michrob dan Chudari, 1993: 69-70; Sunatra, 1997: 184

**Ketiga**, F. G. Putman Craemer, Residen Banten (1925-1931), mengatakan bahwa kaum *jawara* berasal dari sebuah perkumpulan yang bernama *orok lanjang* yang dibentuk oleh kaum pemuda di Distrik Menes, Pandeglang. Perkumpulan ini, yang secara harfiah berarti “bayi menjelang dewasa”, didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan sikap tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat dan membantu penyelenggaraan suatu pesta. Lama kelamaan, bila ada orang menyelenggarakan hajatan, mereka harus diundang dan disertai tugas penyelenggaraannya. Bila tidak demikian, mereka akan mengacau dan menggagalkan pesta. Organisasi semacam ini kemudian meluas ke luar Menes dan berubah menjadi organisasi tukang pukul yang disebut *jawara*. Mereka menjadi kelompok yang ditakuti oleh masyarakat, bahkan pangreh praja pun tidak berani bersikap tegas kepada mereka. Sejak tahun 1916, pangreh praja yang menghadiri pesta selalu membawa senjata api karena takut diganggu oleh kaum *jawara*.<sup>17</sup>

**Keempat**, kaum *jawara* berasal dari sekelompok orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Pada abad ke-19, ketika pemerintah kolonial terhadap masyarakat pribumi semakin besar, muncul berbagai perlawanan dari rakyat dengan pusat perlawanan berada di sekitar para kiai. Para kiai ini, umumnya mempunyai dua kelompok santri yang berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Kelompok pertama adalah orang-orang yang memiliki bakat di bidang ilmu agama sehingga kelak bisa menjadi ulama seperti gurunya. Mereka kemudian diberikan ilmu hikmah oleh gurunya selain diberikan ilmu-ilmu agama Islam. Kelompok kedua adalah para santri yang mempunyai bakat yang berkaitan dengan ilmu bela diri. Oleh karena itu, mereka dibina dalam hal kekuatan fisik. Mereka pun diberi ilmu hikmah, tetapi porsinya jauh lebih sedikit dibandingkan ilmu hikmah yang diberikan kepada santri kelompok pertama. Dengan kemampuan bela diri yang dimilikinya, mereka disertai tugas untuk melakukan teror terhadap Pemerintah Kolonial Belanda beserta para kaki tangannya. Golongan kedua inilah yang kemudian disebut *jawara*.<sup>18</sup>

**Kelima**, dikatakan bahwa sebutan *jawara* mulai dikenal oleh masyarakat sekitar tahun 1809 ketika Gubernur Jenderal H. W. Daendels (1808-1811) memerintahkan pembuatan jalan pos dari Anyer ke Panarukan. Pembuatan jalan tersebut mengakibatkan

<sup>17</sup> Indonesia, 1980: XXIII; Ekadjati, 1995: 223; Lubis, 2003: 129

<sup>18</sup> Lubis, 2003: 127; Sunatra, 1997: 185

terjadinya perlawanan rakyat Banten yang kemudian dikenal dengan sebutan *perang pertama*. Seiring dengan perlawanan rakyat itu, lahirlah sebutan *jawara* seperti yang dikatakan oleh Rd. Muhammad Taufiq Djajadiningrat.<sup>19</sup>

Menurut Tihami dalam Mansur (2000: 269-270), Sejak zaman dahulu, Santri dan jawara merupakan murid Kyai. Diantara murid kyai, ada yang angleh (berbakat) pada ilmu pengetahuan agama dan ada yang angleh pada hal-hal yang bernuansa kejuangan. Murid kyai yang memiliki kecenderungan pada ilmu-ilmu agama disebut santri sementara yang memiliki kecenderungan pada kekuatan fisik dan bernuansa magi disebut dengan jawara. Oleh karena itu santri disebut sebagai pembela agama sementara jawara bertindak dalam perjuangan kemerdekaan dan perjuangan lain. Para santri karena ia juga ikut berjuang bersama Kyai, maka ia juga dibekali dengan kemampuan mempertahankan fisik. Sedangkan jawara, meskipun kecenderungannya mempunyai kekuatan fisik, namun karena ia juga merupakan murid kyai, maka jawara pun diisi dengan ilmu hikmah

Dimasa sekarang, jawara yang diasosiasikan sebagai orang yang jago silat, berpakaian hitam-hitam dan membawa golok sebagaimana disebutkan dalam beberapa penelitian sudah jarang ditemukan lagi. Kalaupun ada, biasanya seragam itu digunakan dalam momen-momen tertentu saja misalnya ketika mobilisasi massa dalam mendukung pembentukan Propinsi Banten.

## **2.5 Pemekaran Wilayah, Pemerintah Daerah dan Pilkada**

### **2.5.1 Pemekaran Wilayah**

Sebelum reformasi bergulir, kekuasaan pemerintah pusat dinilai sangat sentralistik. Banyak daerah-daerah kaya yang merasa berbagai hasil kekayaan alamnya hanya dimanfaatkan oleh pemerintah pusat. Malley (2001) bahkan berpendapat bahwa rezim orde baru, mewujudkan kekuasaan sentripetal, yakni berat sebelah memihak pusat dan bukan pinggiran (daerah).

Ketika presiden B.J Habibie memimpin pasca pengunduran diri presiden Soeharto, diterbitkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah atau yang biasa disebut desentralisasi. Dengan terbitnya undang-undang ini, daerah tidak

<sup>19</sup> Djajadiningrat, 1995: 121-122

lagi sepenuhnya bergantung pada Jakarta dan tidak mau didikte lagi oleh pusat. Bahkan beberapa daerah seperti Aceh, Riau dan Papua menuntut merdeka dan ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. (Agustono, 2005, hal 163).

Sejak otonomi daerah diberlakukan, setidaknya pada tahun 2007 tercatat 7 Propinsi, 135 Kabupaten dan 32 Kota sudah terbentuk. Kartasamista (2008) mengemukakan bahwa sejak otonomi daerah diberlakukan mulai dari 1999-2008 tercatat sudah 192 daerah otonom yang terbentuk.

Ketidakadilan yang dirasakan oleh berbagai daerah sepertinya menjadi salah satu faktor pendukung digulirkannya isu pemekaran wilayah dan otonomi daerah. Effendi (2008) menyebutkan setidaknya ada tiga alasan mengapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang paling diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas (Hermanislamet, 2005). Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal (Hermanislamet, 2005). Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergal.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.



Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban

Secara normatif prosedur pemekaran wilayah mengacu pada pasal 16 PP 129/200, yang mencakup tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Ada kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan
- b. Pembentukan daerah harus didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
- c. Usul pembentukan kabupaten/kota disampaikan kepada Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan dilampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota serta persetujuan propinsi, yang dituang dalam keputusan DPRD
- d. Dengan memperhatikan usulan Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan Tim untuk melakukan observasi ke daerah yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
- e. Berdasarkan rekomendasi pada huruf d, Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah meminta tanggapan para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan dapat menugaskan Tim Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ke Daerah untuk melakukan penelitian lebih lanjut
- f. Para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah memberikan saran dan pendapat secara tertulis kepada Ketua Dewan Pertimbangan otonomi Daerah, usul pembentukan suatu daerah diputuskan dalam rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

- g. Apabila berdasarkan hasil keputusan rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui usul pembentukan Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengajukan usul pembentukan Daerah tersebut beserta rancangan Undang-undang Pembentukan Daerah kepada Presiden.
- h. Apabila Presiden menyetujui usul dimaksud, Rancangan Undang-undang pembentukan Daerah disampaikan kepada DPR-RI untuk mendapat persetujuan.

Jika melihat pada kerangka normatif pendirian daerah dimana kemauan politik dari pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu unsur pertama proses pemekaran wilayah, maka Kyai dan Jawara memiliki peran yang strategis karena kedudukannya sebagai pemimpin informal ditengah masyarakat yang juga merupakan elit lokal.

Effendi (2006) mengemukakan bahwa meskipun pemekaran wilayah merupakan suatu yang terjadi dibawah, namun dalam prakteknya lebih banyak diinisiasi oleh elit-elit lokal saja. Masyarakat luas (publik) dimobilisasi dalam ruang-ruang terbatas seperti forum seminar dan lokakarya atau forum sosialisasi.

### **2.5.2 Pemerintahan Daerah**

Sejak reformasi digulirkan, Indonesia memulai babak baru dalam pemerintahan dimana daerah – daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengelola dan membangun daerahnya.

Otonomi daerah merupakan wajah lama dengan fenomena baru dalam pemerintahan Indonesia.<sup>20</sup> Sejak era pemerintahan orde baru, konsep otonomi daerah sebenarnya sudah dikenalkan melalui UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Dulu, pemberian status otonom bagi daerah-daerah dipahami sebagai penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat secara terbatas. Namun di era ini, otonomi daerah dipahami sebagai penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah kecuali pada bidang-bidang tertentu.

<sup>20</sup> Pembangunan Sosial di Era Otonomi Daerah, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2004

Makna penting dari otonomi daerah sebagaimana disampaikan oleh Syaukani, H.R., Gaffar, A., dan Rasyid, M.R., (2002) dalam Koko (2004) adalah “penguatan masyarakat local dalam rangka kapasitas demokrasi baik ditingkat local ataupun nasional, pengembalian martabat dan harga diri masyarakat daerah yang sudah lama dimarginalkan...”<sup>21</sup>

Jaminan otonomi yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih banyak lagi dalam membangun daerah. Masyarakat pun lebih bisa menyalurkan aspirasinya dalam memilih pemimpinnya dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan demikian, semangat otonomi daerah bukan sekedar penyerahan wewenang namun juga diiringi dengan tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh pemerintahan daerah agar lebih dekat dengan masyarakat sehingga mampu melayani mereka dengan lebih baik.

Otonomi daerah dalam amanah UU nomor 32 Tahun 2004 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Idealnya, otonomi daerah dalam prakteknya harus mengikut sertakan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan. Dengan demikian maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan jalan menuju terciptanya kehidupan yang demokratis. Hernandes (1999) sebagaimana dikutip Ricky dalam Koko (2004) menyatakan bahwa dalam pemerintahan yang demokratis apalagi dalam praktek pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting (*critical one*)<sup>22</sup>

Menurut Antovt dan Novack (1998) partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan secara terus menerus dan aktif dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingan umum.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Syaukani, H.R., Gaffar, A., dan Rasyid, M.R., Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, 2002

<sup>22</sup> Koko Surya Dharma, Partisipasi Masyarakat Di Era Otonomi Daerah, PPPI, Setjen DPR RI, 2004

<sup>23</sup> ibid

Thomas (1995) memberikan pengertian partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Adapun bentuk-bentuk yang dapat dibangun dalam masyarakat antara lain: *key contact, public meeting, advisory committees, citizen survey, citizen contact, negotiation and mediation.*<sup>24</sup>

### 2.5.3 Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Sebelum Undang-undang nomor 32 tahun 2004 diberlakukan, mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dituangkan dalam UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No 22 tahun 1999. Menteri Dalam Negeri dalam undang-undang ini juga memiliki wewenang untuk menetapkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana usulan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD).

Masyarakat mulai memiliki mekanisme baru dalam memilih kepala daerah seiring dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang disahkan pada bulan oktober 2004. Mekanisme baru tersebut yaitu dipilihnya kepala daerah secara langsung oleh masyarakat. Sebelumnya, mekanisme pemilihan secara langsung hanya diberlakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung menurut Karsayuda (2005) oleh sebagian kalangan dianggap akan menjadi terapi bagi lahirnya suatu pemerintahan yang lebih baik, dibanding pemerintahan yang dihasilkan UU No 22/1999. Sebagaimana disadari bersama, pergantian kekuasaan yang dilandasi UU No 22/1999 banyak menghasilkan 'kecurangan'.

Kecurangan yang terjadi pada mekanisme sebelumnya dikarenakan karena beberapa faktor yaitu:

1. Posisi DPRD sebagai institusi tunggal penyelenggara pilkada pada saat itu berdasarkan UU No.22/1999 mempunyai hak relatif penuh untuk menentukan siapa yang berhak menjadi kepala daerah dan wakilnya. Kekuasaan yang sangat besar yang dimiliki oleh DPRD ini tidak diikuti adanya lembaga

<sup>24</sup> ibid

pengawasan yang cukup kuat untuk mengontrol proses pilkada tersebut. Hal ini berdampak pada banyaknya kasus politik uang yang hamper menyertai seluruh proses pergantian kekuasaan di daerah.

2. Intervensi parpol pusat terhadap parpol di daerah dalam menentukan calon yang diajukan partai bersangkutan.
3. Adanya intervensi pemerintah pusat terhadap proses pilkada. Berdasarkan pasal 40 ayat (3) UU No 22/1999 pemerintah pusat diberikan wewenang untuk mengesahkan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dipilih dan ditetapkan DPRD.

Wahidin (2008) mengatakan pada dimensi politik tingkat local (daerah), sebagai akibat dari diutamakan aspek dukungan politik (akseptabilitas), pada akhirnya mengabaikan aspek kapabilitas. Akseptabilitas yang berarti mempunyai akses kepada anggota dewan berpeluang paling besar untuk menjadi kepala daerah.

Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan legalitas kepemimpinan yang dihasilkannya. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak mencerminkan akuntabilitas dan transparansi. Padahal didalam dimensi administrative, kepemimpinan yang berhasil harus memperoleh dukungan dari rakyat (Wahidin, 2008).

Pilkada langsung, dari awal prosesnya ingin mengembalikan kesadaran berdemokrasi pada hakikat yang sesungguhnya yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat (Karsayuda, 2005).

Idealisme dari perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah adalah untuk memberi makna yang substantive terhadap pemilu yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Rakyat diberikan haknya pada ruang yang cukup – bahkan sangat luas untuk menentukan pemimpinnya. Kedaulatan rakyat dikembalikan dalam bentuk penyediaan ruang yang luas sebagai sarana perwujudan kedaulatannya sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 (Wahidin, 2008).

Ma'ruf (2004) mengemukakan beberapa manfaat pemilihan kepala daerah langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia:

Universitas Indonesia

Pertama, pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan langsung.

Kedua, Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945

Ketiga, Pilkada langsung dipandang sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civics education)

Keempat, pilkada langsung dipandang sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah

Kelima, pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional.

Pilkada juga dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk menguatkan peran civil society. Penguatan ini dapat diwujudkan karena:

1. Pilkada langsung telah memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih wakilnya.
2. Pengawasan oleh masyarakat diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengawasi kandidat yang diajukan oleh partai politik
3. Penguatan peran masyarakat pada pilkada diharapkan dapat membuat kepala daerah terpilih untuk lebih menghargai suara rakyat sehingga meminimalisir kebijakan-kebijakan yang dapat merugikan masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan secara langsung terhadap kepala daerah baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota memperoleh legitimasi konstitusional melalui amandemen UUD 1945 yang kedua. UUD 1945 telah menambah satu ayat dalam Pasal 18 UUD 1945 yang kemudian dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Ketentuan didalamnya menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis yang dimaknai sebagai pemilihan langsung oleh rakyat.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang peran kepemimpinan kyai dan jawara dalam pemilihan kepala daerah Kota Serang.

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Creswell, 2003:182).

Sementara menurut Lincoln dan Guba, penelitian kualitatif menekankan pada pengungkapan makna dan proses dan merupakan hal yang emosional, latar belakang alami (*natural setting*) digunakan sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (Lincoln dan Guba, 1985: 198).

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berusaha untuk melakukan interaksi dan membangun komunikasi dengan pihak – pihak yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Pertimbangan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah karena yang diteliti merupakan objek yang dinamis yaitu para Kyai dan Jawara. Karena kedinamisan itulah peneliti akan lebih mudah untuk bisa mengungkapkan makna dan proses yang terjadi.

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi secara langsung dan juga tidak langsung dengan mempelajari berbagai dokumen untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai peran kepemimpinan Kyai dan Jawara. Untuk melengkapi data, peneliti juga

akan melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan informan-informan kunci. Tahapan wawancara dilakukan sebagai berikut :

1. Peneliti menghubungi informan untuk menjelaskan tentang penelitian dan menyepakati waktu wawancara.
2. Sebelum wawancara dimulai dilakukan *rapport* dengan cara menelepon menjelang kunjungan dan membangun keakraban dengan menanyakan kesesuaian mereka, pekerjaan atau informasi lainnya.
3. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.
4. Hasil wawancara dibuat *transkrip* dan dianalisa.
5. Wawancara dilakukan kembali untuk melengkapi data yang belum tergal pada wawancara sebelumnya.

### 3.3 Sumber Data

Informasi yang diperlukan dalam penelitian dikelompokkan dalam dua sumber yaitu:

#### 1. Data Primer,

Data primer yaitu data yang diperoleh dari keterangan – keterangan langsung yang diberikan oleh responden baik melalui wawancara langsung maupun observasi langsung. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) kepada para informan yang telah dipilih, yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian secara mendalam.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara elite, yaitu kepada mereka yang memiliki akses level informasi. Wawancara mendalam semi terstruktur dengan para informan menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball* untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. *Purposive sampling* artinya jumlah informan disesuaikan berdasarkan kebutuhan data. Menurut (Neuman 2000:198) *purposive sampling* merupakan jenis penarikan sample untuk tujuan khusus, yaitu;

- 1) untuk memilih kasus-kasus yang informasinya bersifat khusus,
- 2) untuk memilih anggota-anggota yang sulit dicapai, dan



3) ingin mengidentifikasi kasus-kasus khusus untuk investigasi yang lebih mendalam.

Dalam penelitian ini dibuat beberapa kategori dan jumlah awal informan. Jumlah informan akan bertambah dengan rekomendasi yang diberikan oleh informan awal (*Snowball*).

**Tabel 3.1**  
**Kategorisasi Awal Informan**

No	Kategori Informan	Jumlah Awal
1	Kyai	2
2	Jawara	2
3	Santri	2
4	Anak Buah Jawara	2
5	Akademisi	2
6	Politisi/birokrat	2

2. Data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti atau data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak – pihak tertentu seperti dokumen-dokumen penyelenggaraan pemilu, kliping Koran maupun hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

### 3.4 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992: 15-20), menggunakan analisis model interaktif dengan tiga prosedur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hal ini merupakan proses analisis siklus dan interaktif sebagai suatu yang saling berhubungan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Hubungan tersebut dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum setelah secara seksama

didiskusikan kembali dengan khalayak dan teman sejawat guna mengembangkan “kesepakatan intersubjektif” sehingga makna yang timbul dari data harus diuji kebenarannya.

### 3.5 Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti akan melakukan tahapan sebagaimana yang disampaikan oleh Creswell (2002: 196)

- a. gunakan metode triangulasi,
- b. gunakan *member-checking*,
- c. gunakan *rich, thick description* untuk menyampaikan penemuan,
- d. klarifikasi bias peneliti yang terbawa dalam penelitian,
- e. tampilkan ketidaksesuaian atau ketidakcocokan informasi,
- f. sediakan waktu yang panjang dalam lokasi penelitian,
- g. gunakan wawancara yang mendalam,
- h. gunakan auditor dari luar untuk mereview proyek penelitian secara keseluruhan.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kota Serang

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, berikut ini akan diberikan gambaran mengenai sejarah Banten yang menjadi bagian dari sejarah Kota Serang saat ini. Karena menurut Kartodirdjo (1984) kepemimpinan tidak pernah terlepas dari konteks sosialnya sehingga dengan melihat akar sejarah daerahnya diharapkan kepemimpinan kyai dan jawara dalam penelitian ini dapat dipahami secara utuh.

Kota Serang merupakan bagian dari Propinsi Banten, sebuah propinsi yang lahir di era-era awal otonomi daerah pasca reformasi sebagai hasil pemekaran dari Propinsi Jawa Barat yang ditetapkan berdasarkan UU No 23 tahun 2002.

Banten sebagai nama suatu wilayah sudah dikenal dan diperkenalkan sejak abad ke 14. Mula-mula Banten merupakan pelabuhan yang sangat ramai disinggahi kapal dan dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah hingga orang Eropa yang kemudian menjajah bangsa ini. Pada tahun 1330 orang sudah mengenal sebuah negara yang saat itu disebut Panten, yang kemudian wilayah ini dikuasai oleh Majapahit di bawah Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Pada masa-masa itu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Demak merupakan dua kekuatan terbesar di Nusantara.

Setelah memasuki masa kemerdekaan muncul keinginan rakyat Banten untuk membentuk sebuah provinsi. Niatan tersebut pertama kali mencuat di tahun 1953 yang kemudian pada 1963 terbentuk Panitia Provinsi Banten di Pendopo Kabupaten Serang. Dalam pertemuan antara Panitia Provinsi Banten dengan DPR-GR sepakat untuk memperjuangkan terbentuknya Provinsi Banten. Pada tanggal 25 Oktober 1970 Sidang Pleno Musyawarah Besar Banten mengesahkan Presidium Panitia Pusat Provinsi Banten. Namun ternyata perjuangan untuk membentuk Provinsi Banten dan terpisah dari Jawa Barat tidaklah mudah dan cepat. Selama masa Orde Baru keinginan tersebut belum bisa direalisasikan.

Pada Orde Reformasi perjuangan masyarakat Banten semakin gigih karena mulai terasa semilirnya angin demokrasi dan isu tentang otonomi daerah. Pada 18 Juli 1999 diadakan Deklarasi Rakyat Banten di Alun-alun Serang yang kemudian Badan Pekerja Komite Panitia Provinsi Banten menyusun Pedoman Dasar serta Rencana Kerja dan Rekomendasi Komite Pembentukan Provinsi Banten (PPB). Sejak itu mulai terbentuk Sub-sub Komite PPB di berbagai wilayah di Banten untuk memperkokoh dukungan terbentuknya Provinsi Banten.

Setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan akhirnya pada 4 Oktober 2000 Rapat Paripurna DPR-RI mengesahkan RUU Provinsi Banten menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengesahkan UU No. 23 Tahun 2000 tentang PPB. Sebulan setelah itu pada 18 Nopember 2000 dilakukan peresmian Provinsi Banten dan pelantikan Pejabat Gubernur H. Hakamudin Djamal untuk menjalankan pemerintah provinsi sementara waktu sebelum terpilihnya Gubernur Banten definitif. Pada tahun 2002 DPRD Banten memilih Dr. Ir. H. Djoko Munandar, MEng dan Hj. Atut Chosiyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pertama.<sup>1</sup>

Propinsi Banten terletak di bagian Barat pulau Jawa yang melingkupi daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang dan yang baru lahir yaitu Kabupaten Tangerang Selatan.

Pulau-pulau di sekitarnya yang masih termasuk wilayah Banten adalah: pulau Panaitan, pulau Rakata, pulau Sertung, pulau Panjang, pulau Dua, pulau Deli dan Pulau Tinjil. Kini jumlah penduduk Banten sekitar 8.098.277 orang dengan komposisi 95,89 % beragama Islam, 1,03 % beragama Katolik, 1,59 % beragama Protestan, 0,22 % beragama Hindu, 1,15 % beragama Budha. Sisanya memeluk agama lokal (sunda wiwitan), yakni orang-orang Baduy.<sup>2</sup>

Posisi Geografis Provinsi Banten berada antara 5°7'50" - 7°1'11" LS dan 105°1'11"-106°12" BT, dengan luas wilayah 9.160,70 km<sup>2</sup>. Sebelah utara dibatasi oleh laut Jawa,

<sup>1</sup> <http://banten.bps.go.id/history2.htm>. keterangan lebih rinci dapat dilihat dalam buku Sekapur Sirih Perjalanan Panjang dan Kronologis Terbentuknya Propinsi Banten 1953 - 2000 oleh Drs. E. Iwa Tuskana Supandri.

<sup>2</sup> Haedari dkk, Studi Tentang Kharisma Kyai dan Jawara di Banten, <http://www.ditperta.net/istigro/ist02-04.asp>, 2002

sebelah selatan oleh samudera hindia, sebelah timur dibatasi oleh Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, sementara sebelah barat dibatasi oleh selat sunda. Ibu kota Propinsi Banten terletak di Kota Serang. Ibu kota propinsi inilah yang dijadikan lokasi penelitian.

Kota Serang merupakan kota yang baru lahir pada tanggal 2 November 2007 sebagai pemekaran dari Kabupaten Serang yang disahkan berdasarkan UU No 32 Tahun 2007. Kota Serang terdiri dari enam kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 501.562 jiwa dan wilayah seluas 266,74 KM<sup>2</sup>. Wilayahnya dikelilingi oleh kabupaten Serang sebagai batas wilayahnya. Jika dalam berbagai literature sejarah digambarkan bahwa pusat ibukota Banten zaman dahulu terletak di Kabupaten Serang, maka Kota Serang yang sekarang ini merupakan jantung dari Kabupaten Serang.<sup>3</sup>

#### **4.2 Pilkada Kota Serang**

Pemilihan umum kepala daerah Kota Serang tahun 2008 merupakan pemilihan umum pertama yang diadakan di Kota Serang pasca dimekarkan dari Kabupaten Serang. Pemilu ini diselenggarakan mengacu pada surat pemberitahuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang tanggal 17 maret 2008 dengan Nomor: 283/42/DPRD/2008 perihal Pemberitahuan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Serang dengan ketentuan Undang-undang nomor 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.

Pemilihan umum kepala daerah Kota Serang pada tahun 2008 juga menjadi pemilihan umum kepala daerah pertama dimana calon independen (calon perseorangan) diperbolehkan untuk ikut serta sebagai peserta pemilu.

Para bakal pasangan calon peserta adalah pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan perolehan suara sekurang-kurangnya 15% dari akumulasi perolehan suara dalam pemilihan anggota DPRD Kab Serang.

---

<sup>3</sup> [www.wikipedia.or.id](http://www.wikipedia.or.id)

Untuk para bakal calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali dan wakil walikota apabila memenuhi ketentuan syarat dukungan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk sampai dengan 250000 jiwa dukungan sekurang-kurangnya 6,5%
2. Jumlah penduduk antara 250000-500000 dukungan sekurang-kurangnya 5%
3. Jumlah penduduk antara 500000-1000000 dukungan sekurang-kurangnya 4%
4. Jumlah penduduk lebih dari 1000000, dukungan sekurang-kurangnya 3%

Dengan ketentuan tersebut diatas, maka calon perseorangan dapat mendaftar sebagai peserta Pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Serang apabila memenuhi syarat dukungan 4%.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Serang selaku penyelenggara pemilihan umum kepala daerah membentuk panitia pemilihan ditingkat kecamatan, desa dan TPS. Pada pemilihan umum kepala daerah Kota Serang tahun 2008, KPUD kabupaten Serang membentuk 6 PPK (Kecamatan), 66 PPS (Desa), dan 726 TPS.

Jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 338.998 pemilih yang terdiri dari pemilih perempuan sebanyak 166.806 dan pemilih laki-laki sebanyak 172.192 pemilih.

Setelah melalui berbagai proses pendaftaran dan verifikasi berkas-berkas pendaftaran, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Serang berdasarkan Berdasarkan Berita Acara hasil rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Serang dengan Nomor: 131/631/KPU/2008 pada tanggal 21 Juli 2008 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2008 dan juga berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Serang Nomor: 131/632/KPU/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Hasil Undian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang tahun 2008 menetapkan delapan pasangan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang yang diputuskan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor: 131/42/Kep.KPU.srg/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Menjadi Peserta Dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang tahun 2008.

Kedelapan pasangan calon yang berhak menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2008 beserta nomor urutnya adalah sebagai berikut:

**Table 4.1**

**Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2008**

Nomor Urut	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
1	Tb. Edi Mulyadi MS	H. Rizal Firdaus, SE
2	H. Jayeng Rana	H. Deden Apriandhi
3	H. Tb. Lucky Kaking	Drs. H. Tb. Ismetullah Al' Abbas
4	Drs. H. Bunyamin, MBA	H. Tb. Haerul Jaman, B.Sc
5	H. Ade Muchlas Syarief, BA	H. Juheni M. Rois, Lc
6	H. M. Aliudin, S.Sos	Hj. Ratu Siti Roudhatulzanah, SH
7	H. R. Kirtam Sanjaya, S.Sos	H. Saiful Jmil
8	H. Pandji Tirtayasa, S.Sos	H. Tb. Ali Rochman

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban KPUD Kabupaten Serang, Tahun 2008

Calon pasangan calon walikota dan wakil walikota berasal dari latar belakang yang beragam mulai dari birokrat, pengusaha maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Diantara pasangan calon walikota dan wakil walikota ada yang memiliki hubungan yang dekat dengan kelompok jawara dan kelompok kyai baik karena kedekatan ideology maupun karena hubungan kekeluargaan. Selengkapnya latar belakang calon pasangan walikota dan wakil walikota disajikan dalam tabel berikut:

**Table 4.2 Latar Belakang Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2008**

<b>Nomor Urut</b>	<b>Calon Walikota Calon Wakil Walikota</b>	<b>Latar Belakang</b>
1	Tb. Edi Mulyadi MS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantan Ketua DPRD Kabupaten Serang</li> <li>• Anggota DPRD Propinsi Banten</li> </ul>
	H. Rizal Firdaus,SE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Birokrat/Pemerintahan Provinsi</li> </ul>
2	H. Jayeng Rana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota DPRD Provinsi Banten</li> <li>• Ketua DPD PDI-P Banten</li> </ul>
	H. Deden Apriandhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS/Birokrat</li> <li>• Ketua KNPI</li> <li>• Anak Tokoh Jawara Banten</li> </ul>
3	H. Tb.Lucky Kaking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusaha Banten</li> </ul>
	Drs. H. Tb. Ismetullah Al'Abbas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulama (Kyai) Masjid Banten</li> </ul>
4	Drs. H. Bunyamin, MBA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Birokrat</li> <li>• Mantan Bupati Kabupaten Serang</li> <li>• Didukung Oleh Perguruan Silat Tmb</li> </ul>
	H. Tb. Haerul Jaman, B.Sc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusaha muda</li> <li>• Anak Dari Tokoh Jawara Banten</li> </ul>
5	H.Ade Muchlas Syarief, BA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusaha</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adik Dari Tokoh ulama Banten</li> <li>• Anggota DPRD Propinsi Banten</li> </ul>
	H. Juheni M.Rois, Lc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota DPRD Kabupaten Serang</li> <li>• Mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Serang</li> <li>• Dekat dengan kalangan Kyai</li> </ul>
6	H.M. Aliudin, S.Sos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusaha</li> </ul>
	Hj. Ratu Siti Roudhatulzanah, SH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusaha</li> </ul>
7	H.R Kirtam Sanjaya, S.Sos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusaha</li> </ul>
	H.Saiful Jamil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selebritis</li> </ul>
8	H.Pandji Tirtayasa, S.Sos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Birokrat</li> </ul>
	H.Tb Ali Rochman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantan Birokrat</li> </ul>

Sumber: Diolah dari wawancara dengan beberapa informan

Sebagaimana undang-undang yang menyebutkan bahwa pasangan calon Walikota dan Wakil walikota merupakan pasangan yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara dukungan 15% dalam pemilu legislative dan atau calon perseorangan yang memiliki dukungan sebanyak 4% dari jumlah penduduk, maka berikut ini merupakan table dukungan partai politik kepada pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2008

**Table 4.3 Partai Politik Pengusung Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2008**

Nomor Urut	Calon Walikota Calon Wakil Walikota	Partai Politik Pengusung
1	Tb. Edi Mulyadi MS H. Rizal Firdaus,SE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perseorangan</li> </ul>
2	H. Jayeng Rana H.Deden Apriandhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li> <li>▪ Partai Syarekat Islam</li> </ul>
3	H. Tb.Lucky Kaking Drs. H. Tb. Ismetullah Al'Abbas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partai Bulan Bintang</li> <li>▪ Partai Kebangkitan Bangsa</li> <li>▪ Partai Patriot Pancasila</li> <li>▪ Partai Demokrasi Kebangsaan</li> </ul>
4	Drs. H. Bunyamin, MBA H. Tb. Haerul Jaman, B.Sc	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partai Golkar</li> <li>▪ Partai Bintang Reformasi</li> </ul>
5	H.Ade Muchlas Syarief, BA H. Juheni M.Rois, Lc	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partai Amanat Nasional</li> <li>▪ Partai Keadilan Sejahtera</li> <li>▪ Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia</li> <li>▪ Partai Penegak Demokrasi Indonesia</li> <li>▪ Partai Merdeka</li> <li>▪ PNBK</li> </ul>

		▪ PPIB
6	H.M. Aliudin Hj. Ratu Siti Roudhatulzanah, SH,S.Sos	▪ Perseorangan
7	H.R Kirtam Sanjaya, S.Sos H.Saiful Jamil	▪ Partai Persatuan Pembangunan
8	H.Pandji Tirtayasa, S.Sos H.Tb Ali Rochman	▪ Perseorangan

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pilkada Kota Serang, KPU Kab. Serang, 2008

Pelaksanaan pemilihan putaran pertama dilakukan serentak di 726 TPS pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2008. Apabila hasil pemilu pada putaran belum memenuhi syarat ketentuan undang-undang yang berlaku untuk menetapkan Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang terpilih, maka akan dilakukan pemilu putaran kedua yang dijadwalkan pada minggu, tanggal 19 Oktober 2008.

Pada putaran pertama, surat suara sah sebanyak 217.611 suara dan surat suara tidak sah sebanyak 11.823 suara. Hasil pemilihan pada putaran pertama tidak menghasilkan pasangan calon yang mendapatkan dukungan 30% lebih suara sehingga harus diadakan pemilu putaran kedua. Hasil pemilu putaran pertama dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Table 4.4 Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota  
Putaran Pertama**

Nomor Urut	Calon Walikota Calon Wakil Walikota	Perolehan Suara
1	Tb. Edi Mulyadi MS H. Rizal Firdaus,SE	10988
2	H. Jayeng Rana H.Deden Apriandhi	46573
3	H. Tb.Lucky Kaking	19979

	Drs. H. Tb. Ismetullah Al' Abbas	
4	Drs. H. Bunyamin, MBA H. Tb. Haerul Jaman, B.Sc	47957
5	H.Ade Muchlas Syarief, BA H. Juheni M.Rois, Lc	44616
6	H.M. Aliudin Hj. Ratu Siti Roudhatulzanah, SH,S.Sos	6357
7	H.R Kirtam Sanjaya, S.Sos H.Saiful Jamil	22326
8	H.Pandji Tirtayasa, S.Sos H.Tb Ali Rochman	18815
	<b>SUARA TIDAK SAH</b>	<b>11823</b>

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pilkada Kota Serang,  
KPUD Kab. Serang 2008

Dari hasil pemilu putaran pertama, menghasilkan dua pasangan yang berhak untuk ikut sebagai peserta pemilu putaran kedua yaitu dua pasangan peserta yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu putaran pertama. Kedua pasangan tersebut yaitu pasangan H. Jayeng Rana - H.Deden Apriandhi (JADEN) dan pasangan Drs. H. Bunyamin, MBA - H.Tb Haerul Jaman,B.Sc (NYAMAN).

Pada putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2008, surat suara sah sebanyak 200.036 dan surat suara tidak sah sebanyak 17.255. Pada pemilu putaran kedua, pasangan NYAMAN berhasil keluar sebagai pasangan terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan memperoleh suara sebanyak 117.334 suara. Daftar selengkapnya perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota putaran kedua adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Perolehan Suara Pilkada Kota Serang Putaran Kedua**

<b>Nomor Urut</b>	<b>Calon Walikota Calon Wakil Walikota</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	H. Jayeng Rana H.Deden Apriandhi	82.702
2	Drs. H. Bunyamin, MBA H. Tb. Haerul Jaman, B.Sc	117.334
	<b>SUARA TIDAK SAH</b>	<b>17.225</b>

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pilkada Kota Serang, KPUD Kab. Serang 2008

Pasangan Jayeng Rana dan Deden Apriandhi (JADEN) memenangi pemilihan disatu kecamatan yakni Kecamatan Taktakan sementara pasangan Bunyamin dan Haerul Jaman (NYAMAN) memenangi pemilihan dilima kecamatan.

Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih yakni pasangan Drs. H. Bunyamin, MBA - H.Tb Haerul Jaman,B.Sc (NYAMAN), ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Serang melalui Surat Keputusan KPUD Kabupaten Serang Nomor: 276/65/Kep.KPU.Srg/2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Serang Tahun 2008 Putaran Kedua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KPUD Kabupaten Serang dan laporan pertanggungjawaban pemilu kepala daerah Kota Serang, secara umum penyelenggaraan pemilu berjalan demokratis namun terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut diantaranya yaitu sosialisasi yang belum optimal karena minimnya dana dan terbatasnya waktu. Selain itu kesadaran politik yang dilihat dari tingkat partisipasi pemilih juga belum optimal, lebih kurang baru 65%. Sedangkan dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2008 sebesar Rp 9.769.272.223.

## BAB V PEMBAHASAN

### 5.1 Keterlibatan Kyai dan Jawara Dalam Pilkada

Kyai dan Jawara saat ini masih tetap diakui keberadaannya sebagai kelompok yang memiliki pengaruh ditengah-tengah masyarakat Banten. Pada pilkada Kota Serang Tahun 2008, Kyai dan Jawara ikut terlibat dalam proses pilkada.

Keterlibatan Kyai ditunjukkan dengan masuknya Kyai dalam daftar juru kampanye pasangan calon walikota dan calon wakil walikota maupun sebagai pihak yang dilibatkan oleh aparat pemerintahan untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tokoh Jawara juga terlibat dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini dikarenakan diantara peserta pemilu terdapat anak mereka. Pasangan Jrn misalnya, menempatkan anak dari salah satu pentolan perguruan silat yang juga dikenal sebagai tokoh jawara yaitu H.Mr. Anak dari H.Mr ini ditempatkan sebagai calon wakil walikota. Hal yang sama juga ditemukan pada pasangan Ny dimana anak dari H.Hsn tokoh jawara paling besar di Banten, ditempatkan sebagai wakil walikota pasangan ini.

Namun secara umum, para peserta pemilu kepala daerah masih menempatkan para kyai dan jawara sebagai tokoh yang harus direbut dukungannya. Hal ini diakui oleh salah satu peserta pemilu yakni Jhr. Menurutnya, pilkada Kota Serang bisa dibilang sangat ramai karena pesertanya yang mencapai delapan pasangan dan juga karena kehadiran calon independen. Ramainya pemilu juga menurut Jhr disebabkan karena latar belakang calon walikota dan calon wakil walikota yang beragam.

*Sebenarnya pilkada kota serang itu posisinya cukup apa ya..bisa dibilang sangat ramai..sangat ramai dengan peserta, sebab ada 8 pasangan..terus disitu ada calon independen..nah memang di (apa namanya) pesertanya sendiri, ada birokrat, politisi, jawara. Jawara itu dalam pilkada ada dua calon walikota. Dari birokrat yang paling*

*banyak. Jawara seperti JRn, terus An walaupun nggak dapat suara, kemudian Lky.*

Sebagai pemimpin masyarakat, Kyai dan Jawara ikut melibatkan diri didalam pilkada. Hal ini didasari atas kesadaran para kyai dan jawara mengenai pentingnya kepemimpinan yang dihasilkan dari proses pemilihan kepala daerah.

Dengan kesadaran tersebut Kyai dan Jawara memainkan pengaruhnya meskipun dalam temuan dilapangan, praktik kepemimpinan antara Kyai dan Jawara dijalankan dengan cara yang berbeda dan tingkat pengaruhnya pun menjadi berbeda pula.

## **5.2 Praktik Kepemimpinan Kyai dan Jawara dalam Pilkada**

Berikut akan dibahas praktik-praktik kepemimpinan yang dilakukan oleh Kyai dan Jawara dalam mempengaruhi atau membujuk pengikutnya sehingga pengikutnya mau bersama-sama melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama atau mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemimpinnya.

### **5.2.1 Praktik Kepemimpinan Kyai**

Berdasarkan pembagian metode praktik-praktik kepemimpinan menurut Soekanto, Kyai mempraktikkan kepemimpinannya dengan cara-cara bebas. Disini Kyai menjalankan peranya secara pasif. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kyai Mhd

*Kalau saya sebagai MUI termasuk saya sendiri, tidak berpihak ke siapa-siapa, inginnya kyai itu milik semua calon, sehingga tidak...seolah-olah kyai itu hanya berpolitik dalam politik praktis. jadi berpolitik itu artinya memperbaiki kekurangan-kekurangan para tokoh politik itu, taruhlah tempat menenangkan hati.*

Keengganan Kyai untuk secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon karena kyai menempatkan dirinya sebagai pengayom

ummat. Dengan sikap yang dipegangnya tersebut, Kyai senantiasa mendukung semua pasangan calon yang datang kepadanya. Hal ini menguatkan pendapat dari penelitian yang dilakukan oleh Dhofier bahwa Kyai ditempatkan oleh masyarakat sebagai pemimpin moral. Dengan kedudukannya sebagai pemimpin moral, maka Kyai lebih nyaman untuk senantiasa berada pada tataran normative seperti memberi nasehat, anjuran dan mendoakan sebagaimana yang diungkapkan oleh Kyai Smn.

*Hanya secara umum kyai kan sifatnya nasehat. Untuk bersikap santun, untuk jujur. Untuk tidak korupsi. Dan lain-lain.*

Hal yang sama diungkapkan oleh Kyai mhd. Menurutnya tugas seorang Kyai itu memberikan ucapan-ucapan yang baik.

*Sudah terbagi-bagi tugasnya. Klo kyai kan tugasnya hanya mengeluarkan ini saja ungkapan, dalil, hadist.. klo lisan sih, kyai memberikan ilmu, memberikan pemahaman. Kyai tugasnya takmuruna bil ma'ruf.*

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sikap netral Kyai hanya dipraktikan ketika Kyai berhadapan dengan masyarakat luas. Namun dikalangan yang memiliki kedekatan hubungan dengan Kyai seperti dikalangan keluarga maupun dilingkungan pesantrennya, Kyai lebih bersikap terbuka dalam menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan calon tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh Kyai Smn kepada keluarganya dan juga kepada dewan guru yang berada dipesantrenya. Kepada keluarga dan dewan guru dipesantrenya, Kyai menerapkan cara-cara demokratis. Kyai mengajak pengikutnya bermusyawarah dan secara aktif memberikan arahan-arahan

*Kalau ke santri tidak. Tapi kalau ke dewan guru iya..saya kumpulkan mereka dan berdialog dengan mereka. Saya sampaikan pandangan-pandangan saya terhadap calon pasangan kepala daerah yang ada...*



Perbedaan praktik kepemimpinan yang dilakukan oleh Kyai dilakukan agar Kyai senantiasa bisa menjaga ukhuwah sesama muslim. Namun praktik kepemimpinan Kyai yang tidak mendukung salah satu pasangan calon tertentu oleh beberapa oknum Kyai dijadikan kesempatan untuk mengumpulkan dana. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu kandidat Bp. Jhn

*Sekarang problemnya ulamanya aja begitu. Kita silaturahmi ke ulama, belum apa-apa ulamanya sudah minta ini, minta itu. Belum lagi yang uniknya disini, Kyai itu tidak memegang satu calon. Jadi politiknya ya begitu. Disini dapet disitu dapet.*

Pemanfaatan momentum pilkada untuk mengumpulkan dana bisa dikarenakan oleh beberapa sebab. Pertama yaitu karena Kyai menyadari bahwa selama ini mereka hanya difungsikan sebagai *vote getter* oleh para politisi. Mereka hanya dijadikan label untuk mencitrakan diri kepada masyarakat bahwa politisi tersebut memiliki kedekatan hubungan dan direstui oleh Kyai. Juga menjadi label bahwa orang tersebut adalah orang yang bersih. Ketika menyadari hal ini, Kyai tidak memberikan *free lunch* kepada para politisi sehingga Kyai pun melakukan transaksi dengan para politisi. Disinilah kemudian kepemimpinan Kyai digunakan sebagai daya tawar antara politisi dengan Kyai sehingga menjadikan Kyai sebagai broker politik. Kedua, pada kenyataannya Kyai memang membutuhkan dana untuk operasional pesantrennya sehingga mereka pun tidak menolak ketika diberikan bantuan oleh calon walikota dan calon wakil walikota tanpa melihat apakah sumbangan tersebut memiliki maksud tersembunyi atau tidak.

Pragmatisme oknum Kyai yang memanfaatkan kepemimpinannya ini pada akhirnya berpengaruh terhadap pandangan masyarakat pada umumnya terhadap Kyai.

Berdasarkan Kouzes dan Posner, ada lima praktik kepemimpinan yang dapat digunakan untuk melihat kepemimpinan seseorang. Berikut ini

akan diuraikan kepemimpinan Kyai berdasarkan teori The Great Leadership dari Kouzes dan Posner:

### 1. Mencontohkan Caranya

Dalam pelaksanaan Pilkada, Kyai memberikan contoh kepada para pengikutnya sikap sebagai warga Negara yang baik. Kyai meskipun tidak menempatkan dirinya secara terang-terangan untuk mendukung salah satu pasangan calon, namun Kyai melarang para pengikutnya terutama orang-orang terdekatnya untuk tidak Golput.

Hal ini dilakukan oleh Kyai, karena Kyai menyadari bahwa kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran agama islam. Sehingga bagi Kyai, ikut terlibat dalam Pilkada merupakan suatu keharusan selama masih ada calon yang bisa dipilih.

Menurut Kyai Smn, kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting. Karenanya menurut Kyai Smn, dirinya melarang ummat islam untuk golput.

*Agama islam mengajarkan kita bahwa ketika mengadakan perjalanan lebih dari satu orang, maka harus dipilih seorang pemimpin diantara keduanya..untuk masalah perjalanan saja kita diwajibkan untuk memilih pemimpin, apalagi dalam konteks sebuah wilayah...karenanya pilkada itu merupakan sebuah kemestian*

Contoh yang diberikan oleh Kyai kepada para pengikutnya lebih kepada contoh sebagai warga negara yang harus ikut bertanggung jawab untuk menentukan pemimpin daerahnya dengan menggunakan hak pilihnya dan menjaga diri dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan keributan dan keresahan ditengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, Kyai tidak ingin dikesankan memihak kepada salah satu pasangan calon sehingga Kyai pun menghindari memakai atribut-atribut bergambar pasangan calon tertentu. Dengan kata lain, Kyai tidak memberikan arahan secara terang-terangan kepada pengikutnya untuk memilih pasangan calon tertentu.

*Saya melarang para santri membawa atau menempel stiker calon dilingkungan pesantren*

Kyai juga banyak yang bermain dengan mendukung semua pasangan calon sebagaimana yang diungkapkan Jhn.

*Uniknya didaerah saya ini Kyai ga cuma megang satu pasangan calon...disini dapet, disitu dapet. Pragmais juga.*

Selain menjaga netralitas, Kyai sepertinya hendak bermain aman mengingat pendanaan pesantren masih banyak yang mengandalkan bantuan dari pemerintah sehingga mereka harus tetap memiliki hubungan baik dengan semua pasangan calon agar setelah terpilih, mereka tetap mendapatkan bantuan dana dari pemerintah.

Keengganan Kyai untuk mendukung secara terang-terangan salah satu pasangan calon dikarenakan juga diantara Kyai ada yang memanfaatkan Pilkada sebagai ajang untuk mengumpulkan dana sehingga Kyai mendukung semua pasangan calon. Bermainya Kyai dibanyak pasangan calon juga dikarenakan sebagian Kyai menyadari bahwa dalam momen-momen seperti Pilkada, mereka hanya dimanfaatkan sebagai *vote getter* dan setelah Pilkada nanti mereka akan ditinggalkan.

Jadi dengan demikian, Kyai masih menempatkan dirinya sebagai pemimpin moral sehingga contoh-contoh yang diberikan pun tidak lebih jauh dari seruan-seruan moral.

## **2. Menginspirasi Visi Bersama**

Kyai memiliki nilai yang diyakininya bahwa Kyai itu harus kebersamaian masyarakat.

Menurut Kyai Mhd, kyai itu ada banyak macamnya yaitu kyai (ulama) yang mati, kyai (ulama) yang meninggalkan ummat, Kyai (ulama) yang ditinggalkan ummat dan Kyai (ulama) yang bersama ummat. Kyai yang ideal itu adalah kyai yang bersama ummat. Artinya, kyai itu harus berada ditengah-tengah ummat dan membimbing mereka.

*Saya tuh sangat teringat betul dengan perkataan Menteri Agama Munawir sajali. Beliau waktu itu bilang kalau ulama itu ada empat macamnya yaitu ulama yang mati, ulama yang meninggalkan ummat, ulama yang bersama ummat, ulama yang ditinggalkan ummat.*

Menurut kyai Mhd, Kyai itu harus kebersamai ummat termasuk ketika ummat berpolitik. Termasuk didalamnya kebersamai ummat dalam menghadapi momentum Pilkada.

*Kyai itu harus terus kebersamai ummat. Termasuk kebersamai ketika ummat berpolitik. Karena didalam agama ini juga ada politik.*

Selain memberikan berbagai nasehat kepada pasangan calon dan juga kepada masyarakat, Kyai juga memberikan criteria kepemimpinan yang sukses yaitu *bi ilmil ulama* (dengan ilmu ulama), *siyasatul umara* (siasat pemerintah), *syahwatul aghniya* (kedermawanan orang kaya), *syujaatil jawara* (keberanian jawara)

*Jadi saya teringat guru saya. Kata guru saya, pemimpin itu berhasil jika bi ilmil ulama, siyasatul umara, syahwatul aghniya dan syujaatil jawara.. pemimpin itu harus punya uang. Susah juga kalau tidak punya uang.*

Karenanya Kyai senantiasa memberikan berbagai nasehat seputar Pilkada. Nasehat-nasehat yang diberikan Kyai kepada pengikutnya pada dasarnya merupakan sebuah pemaparan visi Kyai mengenai bagaimana seharusnya ummat memilih pemimpinnya sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dapat ditangani oleh pemimpin yang tepat. Kyai memberikan kriteria-kriteria pemimpin yang baik agar umat tidak salah memilih.

Kyai menyadari bahwa Kota Serang dan Banten pada umumnya masih menghadapi berbagai permasalahan seperti kemiskinan dan tingkat

pendidikan yang belum tersebar merata. Dengan berbagai permasalahan tersebut maka menurut Kyai harus ada sinergitas antara ulama (Kyai), pemerintah, orang-orang kaya dan jawara.

### 3. Menantang Proses

Kyai pada umumnya memilih dalam posisi netral sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kyai Mhd. Kyai Mhd tidak mendukung calon siapapun tapi bukan berarti Golput. Kyai Mhd lebih memilih untuk berdiri diatas semua calon. Memperbaiki kekurangan-kekurangan para tokoh politik.

*Kalau saya sebagai MUI termasuk saya sendiri, tidak berpihak ke siapa-siapa, inginnya kyai itu milik semua calon, sehingga tidak...seolah-olah kyai itu hanya berpolitik dalam politik praktis. jadi berpolitik itu artinya memperbaiki kekurangan-kekurangan para tokoh politik itu, taruhlah tempat menenangkan hati.*

Hal yang sama dilakukan oleh Kyai Smn. Menurut Kyai Smn, hal ini dilakukan agar Kyai senantiasa dapat mengarahkan masyarakat.

*Dalam kampanye Kyai tidak terlibat. Mungkin sebagian kyai tidak. Didepan publik tidak. Karena bagaimanapun juga perlu kita mengarahkan masyarakat..*

Sikap Kyai Smn juga diterapkan dalam menghadapi pemilu presiden yang berlangsung tahun ini.

*Peran Kyai itu bermacam-macam. Ada Kyai yang berterus terang dengan jadi jurkam, ada juga jadi tim sukses dibelakang, meluruskan pendapat masyarakat yang terkadang tidak mendasar...misalnya yang sekarang terjadi terhadap bahwa seorang calon adalah katolik....*

Namun kepada orang-orang yang sudah dikenal baik olehnya dan memiliki hubungan yang akrab, Kyai Smn

memperjelas dukungannya kepada salah satu pasangan calon bahkan mengarahkan orang tersebut kepada pasangan calon yang dipilihnya.

*Tidak berperan aktif, kalau ditanya akan menjawab...kecuali kepada orang-orang yang sudah akrab, akan diarahkan.. berdialog dengan masyarakat..agar lebih objektif..agar kyai tidak dianggap berpihak...*

Keputusan Kyai untuk bersikap netral dalam Pilkada menjadikan Kyai tidak terlihat untuk memberikan tantangan kepada para pengikutnya dalam memenangkan pasangan calon tertentu. Hal ini diakui oleh Sli yang tinggal di lingkungan pesantren

*Nggak..Kyai nggak pernah menyuruh-nyuruh kita untuk memilih si A ato Si B. tapi kita sendiri tahulah Kyai milih siapa. Jadi kita juga ga sungkan-sungkan untuk memilih sama seperti pilihan kyai.*

Jadi selama pilkada berlangsung, para Kyai tidak memberikan tantangan yang membuat pengikutnya berusaha untuk mengerahkan kemampuannya guna memenangkan pasangan calon tertentu. Namun kepada orang-orang terdekatnya Kyai menyampaikan bahwa harus ada perubahan di Serang atau Banten. Dan itu bisa dilakukan ketika masyarakat memilih pasangan XXX. Hal itu dikemukakan Kyai Smn pada guru-guru dipesantrenya.

*Saya tidak terlihat mendukung itu bukan berarti diam. Kita ini harus berubah. Gimana mau berubah klo yang jadi pemimpin dari situ-situ juga. Makanya kita usahakan bareng-bareng biar yang terpilih itu orang yang amanah dan taat ada Allah*

Dengan demikian, dalam hal memberikan tantangan Kyai tidak memberikan tantangan kepada semua pengikutnya melainkan hanya kepada para pengikutnya yang sudah dikenal dekat.

#### 4. Memungkinkan Orang Lain Bertindak

Para pengikut Kyai diberikan kesempatan untuk memilih sesuai dengan pilihannya. Namun kesempatan yang diberikan oleh Kyai bisa dikatakan sangat terbatas karena Kyai melarang para santri untuk membawa alat-alat peraga kampanye seperti stiker maupun poster kedalam lingkungan pesantren.

Kyai Smm menggunakan pengaruh kepemimpinannya dilingkungan pesantrenya. Meskipun tidak ke para santrinya, namun ia mengumpulkan para dewan guru dan berdialog dengan mereka. Meskipun dikumpulkan namun sifatnya tidak dipaksa untuk memilih calon tertentu. Kyai juga berdialog dengan masyarakat.

*Kalau ke santri mah nggak. Tapi kalau ke dewan guru iya..saya kumpulkan mereka dan berdialog dengan mereka. Saya sampaikan pandangan-pandangan saya terhadap calon pasangan kepala daerah yang ada... kalau ke wali santri saya tidak mengarahkan karena latar belakang wali santri beragam...jadi saya berusaha untuk meluruskan masyarakat.mulai dari meluruskan keluarga terkait berbagai isu-isu yang tidak benar. Juga berdialog. Jadi kyai itu tugasnya mengkondusifkan masyarakat. Kyai diharapkan bisa menjaga ukhuwah sesama muslim.*

Dengan mengumpulkan dewan guru, Kyai berharap bahwa guru-guru bisa ikut terlibat menyampaikan pandangan-pandangan Kyai terhadap calon-calon yang ada kepada masyarakat. Jadi Kyai tidak turun langsung dalam mensosialisasikan pasangan calon yang dipilihnya untuk menjaga sikap netral.

#### 5. Menyemangati Jiwa

Posisi Kyai yang cenderung netral dan tidak memperjelas dukungan politiknya kepada pasangan calon tertentu menyebabkan Kyai tidak banyak memberikan semangat kepada para pengikutnya dalam

memenangkan pasangan calon. Kyai lebih banyak memberikan semangat kepada para pengikutnya untuk tidak salah memilih pemimpin.

Kyai Smn ketika mengumpulkan para dewan guru senantiasa berpesan bahwa memilih pemimpin itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya. Sehingga Kyai Smn mengingatkan bahwa setiap pengikutnya harus senantiasa mengusahakan agar yang lahir dari proses Pilkada adalah pemimpin-pemimpin yang tepat.

*Saya katakan kepada guru-guru bahwa memilih pemimpin itu permasalahan didunia dan akhirat. Permasalahan didunia karena menyangkut nasib ummat hendak dibawa kemana. Menyangkut masalah akhirat karena setiap kita pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya terhadap apa-apa yang kita pilih.*

Nasehat yang sama diberikan oleh Kyai Mhd ketika mengisi pengajian-pengajian yang dipimpinya. Dia mengingatkan agar para pengikutnya menggunakan hak pilihnya agar pemimpin yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat bisa terpilih.

*kalau yang dipilih tidak ada, baru boleh golput. Nah kemaren kan masih ada pasangan calon walikota dan calon wakil walikota yang bisa kita harapkan. Sehingga saya melarang golput. Meskipun tidak secara langsung, tapi saya mendekati masyarakat kepada pasangan calon dengan memberikan criteria-kriteria pemimpin ummat.*

Selama proses pilkada berlangsung, Kyai mempraktikan kepemimpinannya hanya dalam tataran normative saja yaitu menjaga agar masyarakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Hal ini disebabkan para Kyai tidak secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon. Ketidakjelasan dukungan Kyai terhadap pasangan calon tertentu membuat Kyai tidak menggunakan kedudukannya sebagai pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya dalam skala yang lebih luas.



Dalam memberikan contoh, Kyai hanya mencontohkan agar para pengikutnya tidak golput dalam pemilihan kepala daerah mengingat pemilihan pemimpin merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran agama islam. Kyai tidak memberikan contoh calon mana yang harus dipilih dalam pilkada. Hal ini dapat dilihat dari larangan Kyai untuk membawa alat peraga kampanye kedalam lingkungan pesantren. Kyai juga tidak memakai kaos pasangan calon tertentu.

Selama Pilkada, Kyai juga tidak memberikan visi bersama yang harus diperjuangkan oleh para pengikutnya dalam memenangkan pasangan calon tertentu. Visi bersama yang diberikan oleh Kyai hanya pada visi untuk bersama-sama menjaga agar lingkungan tetap kondusif.

Kyai mempraktikkan kepemimpinannya hanya dalam hal "memungkinkan orang lain bertindak". Disini Kyai merapkan prinsip syuro dan membebaskan para pengikutnya untuk memilih calon manapun sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing pengikutnya. Namun walaupun Kyai membebaskan pengikutnya untuk memilih pasangan calon manapun, mengingat Kyai merupakan tokoh sentral dalam lingkungan pesantren, para pengikutnya dengan sukarela menyamakan pilihannya dengan pilihan sang Kyai.

Sikap Kyai untuk tidak menggunakan kepemimpinannya dalam memenangkan salah satu pasangan calon dikarenakan Kyai masih menempatkan dirinya sebagai pemimpin moral yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat.

### 5.2.2 Pengaruh Kepemimpinan Kyai dalam Pilkada

Kepemimpinan kyai saat ini masih tetap diakui meskipun mengalami dinamika. Kyai Mhd mengungkapkan bahwa saat ini, pengaruh Kyai masih tetap kuat bahkan melebihi pengaruh pemerintah.

*Alhamdulillah....di banten itu, kyai masih tinggi perannya daripada pemerintah. Karena di banten itu masyarakatnya masih patuh kepada perintah kyai. Contohnya, tidak ada keributan, karena kyai itu akur dg umat.*

Menurut Kyai Mhd, Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa rakyat lebih mempercayai kyai daripada pemerintah

*Yang pertama, ulama itu memiliki ilmu, terutama sekali ilmu-ilmu agama. Kedua, ulama itu jadi percontohan. Ketiga, ulama itu bekerja tanpa pamrih contohnya ulama itu membangun pesantren tanpa mengharap bantuan dari pemerintah. Keempat, ulama itu melayani umat tanpa mengenal waktu. Yang kelima, ulama itu memiliki berbagai disiplin ilmu disamping ilmu-ilmu agama.*

Menurut Kyai Smn, kepemimpinan Kyai masih cukup berpengaruh ditengah-tengah masyarakat Banten meskipun mengalami dinamika. Hal ini menurutnya dapat dilihat dari masih berdatangnya masyarakat kepada kyai. Masyarakat masih menjadikan kyai sebagai tempat untuk mengadakan berbagai permasalahan kehidupan dan tempat untuk meminta nasehat. Kyai Smn bahkan mencontohkan bahwa polisi saja masih butuh dengan kyai untuk membantu menjaga ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat. Beberapa kelompok juga masih menempatkan kyai sebagai tokoh yang berpengaruh karena kyai dianggap memiliki jaringan yang cukup luas.

*Secara nurani, kyai itu dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab mereka ada masalah apa-apa datangnya juga ke kyai. Minta pendapat. Minta saran... Polisi aja butuh kyai. Sepertinya masalah jaringan juga.*

Menurut Kyai Smn, kepemimpinan kyai ditengah-tengah masyarakat itu disebabkan karena ucapan seorang kyai itu memiliki pengaruh ditengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan kekuatan ucapannya itu seorang Kyai dapat menggerakkan orang lain. Selain karena factor ucapannya yang memiliki pengaruh, kyai menjadi pemimpin masyarakat adalah karena keilmunya.

*Kyai itu sebagai pemimpin karena ucapannya sangat berpengaruh. Karena pengaruhnya itu pula, jika kata-katanya salah sementara pengikutnya fanatik, bisa berakibat salah juga. Kyai juga menjadi pemimpin karena ilmunya...karena kewajiban agama juga untuk membimbing masyarakat.*

Seorang Kyai, menurut Kyai Smn memiliki kewajiban untuk memimpin masyarakat. Jadi menjadi pemimpin merupakan perintah agama yang harus dijalankan oleh seorang Kyai.

*Sebagai orang yang lebih tahu pengetahuan soal agama dan masyarakat itu butuh penerangan maka wajib bagi kyai untuk membimbing masyarakat...seorang yang disebut kyai tidak boleh membiarkan ketidaktahuan masyarakat...*

*Perintah menuntut ilmu juga menjadi perintah untuk mengajarkan ilmu. jika menuntut ilmu itu wajib maka adanya guru juga wajib adanya...kaidahnya man laa yatimul waajib illa biha fahuwal wajib (Sesuatu hal yang membuat kewajiban tidak sempurna karenanya, maka sesuatu itu menjadi wajib).....*

Kepemimpinan Kyai juga diakui oleh En. Menurutnya kepemimpinan kyai itu masih berpengaruh ditengah-tengah masyarakat Banten. Hal ini dikarenakan kyai dipandang sebagai orang yang memiliki kelebihan terutama kelebihan dalam masalah-masalah keagamaan. En juga menyatakan bahwa kepemimpinan kyai harus tetap hidup karena kyai itu ibarat obor bagi Banten.

*Klo kyai, saya rasa sah saja disebut sebagai pemimpin. Karena kyai itu disebut Kyai kan karena faktor kelebihan yang dimilikinya. Faktor karena kelebihan ilmu itulah biasa dia diisebut kyai. Saya masih angkat topi dengan mereka. Kyai masih cukup di dengar, karena setiap wilayah itu kan punya alim ulama atau kyai sebagai tokoh yang didengar*

Menurut Ah, kepemimpinan kyai ditengah masyarakat Banten merupakan kepemimpinan yang muncul ditengah masyarakat Banten. Secara sejarah Ah menguraikan bahwa semenjak kesultanan Banten runtuh, masyarakat tidak memiliki pegangan kecuali kepada orang-orang yang memiliki kelebihan. Kyai sebagai orang yang memiliki kelebihan, menempati ruang kosong yang ditinggalkan oleh kesultanan Banten. Kepemimpinan Kyai juga diperkuat oleh beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa masyarakat Banten adalah masyarakat yang kental beragama islam. Van Brunensen bahkan mengatakan bahwa masyarakat Banten jauh lebih taat menjalankan agama islam daripada masyarakat lainnya. Selain itu, Banten juga pernah menjadi pusat penyebaran agama islam sehingga wajar jika sosok kyai menjadi pemimpin ditengah-tengah masyarakat Banten dan masih terasa pengaruhnya hingga sekarang.

*Secara sejarah, setelah runtuhnya kesultanan di banten masyarakat sudah tidak punya pegangan. Kecuali, pada orang-orang yang dianggap punya kelebihan. Nah, terus pada masyarakat Banten dan di beberapa penelitian juga dikatakan bahwa masyarakat Banten merupakan masyarakat yang kental beragama islam. Van Brunensen bahkan mengatakan bahwa orang Banten itu jauh lebih taat beribadah di banding masyarakat yang lain. Banten juga pernah menjadi pusat penyebaran agama islam, jadi wajar kalau kyai menjadi orang yang paling dipercaya ketika kesultanan Banten runtuh.*

Mdr, salah satu pimpinan perguruan silat tertua di banten juga sependapat bahwa Kyai masih merupakan sosok berpengaruh diBanten. Bahkan diperguruanya, sosok kyai sangat disegani karena sejarah perguruan silatnya tidak bisa dilepaskan dari sosok Kyai.

*Ada satu makam di desa ini yang merupakan dari kalangan aulia. Desa ini dizaman kesultanan dulu pernah ditunjuk sebagai menteri pertahanan lah kalau sekarang. Namanya kyai beji. Nama desa ini juga sebenarnya nama dari seorang aulia namanya Ki*

*Trumbu..jadi disini tuh dulu banyak yang dilatih untuk menjadi prajurit dalam menyebarkan syariat islam..jadi Kyai itu merupakan penasehat dari para orang-orang yang belajar silat disini.*

H. Udn, salah satu sesepuh perguruan silat di Serang mengatakan bahwa Kyai itu pantang dilawan.

*Kyai itu punya Kharisma tersendiri. Kalau melawan kyai engke bisi kualat.. (kalau melawan kyai, nanti bisa kualat)*

Menurut Kyai Mhd, kyai itu ada banyak macamnya yaitu kyai (ulama) yang mati, kyai (ulama) yang meninggalkan ummat, Kyai (ulama) yang ditinggalkan ummat dan Kyai (ulama) yang bersama ummat. Kyai yang ideal itu adalah kyai yang bersama ummat. Artinya, kyai itu harus berada ditengah-tengah ummat dan membimbing mereka.

*Saya tuh sangat teringat betul dengan perkataan Menteri Agama Munawir sajali. Beliau waktu itu bilang kalau ulama itu ada empat macamnya yaitu ulama yang mati, ulama yang meninggalkan ummat, ulama yang bersama ummat, ulama yang ditinggalkan ummat.*

Menurut Jhn, Kyai sudah tidak lagi memiliki pengaruh ditengah-tengah masyarakat, terutama sebagai referensi bagi ummat dalam memilih.

*Menurut hemat saya, tidak ada yang berpengaruh besar. Kyainya saja begitu. Belum apa apa sudah minta ini itu. Klo di TPSnya mungkin iya. Tapi ditempat lain tidak.*

Sli, orang yang tinggal dilingkungan pesantren mengatakan bahwa pilihan Kyai lumayan mendapatkan suara diTPS dekat pondok pesantren.

*Klo nggak salah, piihan Kyai itu urutan kedua.yang pasti urutan pertamanya pasangan Ny..wajar sih, karena Ny kan masih kerabatnya gubernur.*

Dari hasil wawancara, para Kyai masih menempatkan dirinya sebagai pemimpin ditengah dimasyarakat. Kepemimpinan Kyai didasari pada pandangan Kyai bahwa memimpin masyarakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada dirinya sebagai orang yang memiliki kelebihan terutama dalam hal agama.

Masyarakat pun masih menempatkan Kyai sebagai pemimpin mereka. Berbagai masalah yang menimpa masyarakat terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah ibadah dan nasehat-nasehat perkawinan masih menempatkan Kyai sebagai orang yang dimintakan pendapatnya.

Kepemimpinan para Kyai bukan sekedar hanya pada santri-santri yang berada dalam pondok pesantren yang mereka kelola namun juga meluas hingga keluar pesantren karena para Kyai juga mengisi berbagai majelis taklim diluar lingkungan pondok pesantren.

Namun dalam Pilkada diKota Serang, Kyai tidak terlalu memiliki pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi masyarakat dalam memenangkan pasangan calon yang menjadi kecondongan pilihanya. Pengaruh Kyai terbatas pada lingkungan pondok pesantrennya saja tetapi ditempat-tempat lain, pengaruh Kyai tidak terlihat.

Kuatnya pengaruh Kyai dilingkungan pesantrennya karena hubungan emosional telah terjalin erat antara Kyai dan pengikutnya sehingga meskipun Kyai tidak meminta para pengikutnya untuk memilih pasangan yang didukungnya, tetapi para pengikutnya dengan sukarela menyamakan pilihanya dengan pilihan Kyai.

### **5.2.3 Praktik Kepemimpinan Jawara dalam Pilkada**

Jawara dalam pemilihan Kepala daerah Kota Serang lebih bersikap terbuka. Secara terang-terangan kelompok Jawara menunjukkan dukunganya kepada salah satu pasangan calon. Jawara mempraktikan kepemimpinanya dengan cara otoriter meskipun menggunakan forum musyawarah. Tetapi

forum musyawarah hanya digunakan sebagai alat legitimasi keputusan pribadinya.

Hal ini dapat terlihat dari ungkapan Pa Mhd yang terlibat sebagai tim sukses pasangan Ny. Pa Mhd mengungkapkan bahwa dirinya menjadi tim sukses atas nama perorangan. Namun bagaimanapun juga, masyarakat tetap melihat dia sebagai pimpinan dari salah satu perguruan silat.

*Klo kita memilih Ny, terutama ya klo Ny itu sudah tau situasi kota serang, beliau kan sudah pernah menjadi bupati. Jadi menurut saya, itu paling cocok. Cuma ada berbagai tanggapan di Masyarakat tapi ya Alhamdulillah jadi. Dari massa yang ada saya arahkan ke situ.*

Ketika Pa Mdr telah menentukan pilihan, ia pun kemudian secara aktif bergerak menggalang dukungan. Aktifnya Pa Mdr menggalang dukungan dikarenakan Pa Mdr sudah yakin dengan pilihannya dan tidak mau merubahnya.

*...saya tujuannya saklek, nggak mau plin plan. Klo memang.....saya itu pinginnya ke A, ya udah.*

Cara yang dipakai Pa Mdr untuk menggalang dukungan masyarakat yaitu dengan mengumpulkan para kasepuhan dikampungnya dan juga melalui jaringan perguruan silat yang tersebar diseluruh kecamatan.

*Saya ngumpulin para kasepuhan. Terus saya sampein pandangan saya soal pasangan Ny itu. Alhamdulillah para kasepuhan menyerahkan ke saya aja gimana baeknya. Alhamdulillah juga kalau didesa ini pasangan yang kita pilih itu yang jadi.*

Hal yang sama dilakukan oleh H.Udn kepada para pengikutnya. H.Udn meskipun membebaskan para pengikutnya untuk memilih pasangan calon mana pun tetapi H.udn meminta bantuan kepada para pengikutnya untuk mendukung pasangan calon yang diukungnya.

Dengan ketegasan sikapnya, Pa Mdr memberikan pengaruhnya kepada para pengikutnya. Pa Mdr memberikan pengaruhnya tidak hanya dikampungnya melainkan juga ditempat-tempat lain terutama ketika latihan silat diadakan. Selain diberbagai cabang perguruan silatnya, Pa Mdr juga masuk ke ibu-ibu pengajian untuk mensosialisasikan pilihannya.

Berikut ini akan diuraikan praktik kepemimpinan Jawara berdasarkan Kouzes dan Posner:

### 1. Mencontohkan Caranya

Dalam Pilkada, Jawara lebih bersikap terbuka dan terang-terangan dalam mendukung pasangan calon tertentu. jawara tidak segan-segan untuk memakai kaos pasangan calon tertentu. dirumahnya bahkan banyak tertempel stiker pasangan calon yang akan didukungnya.

Pa Mdr secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon. Hal ini dibuktikanya dengan memakai kaos bergambar pasangan calon yang didukungnya.

*Kalau saya mah g perlu menutup-nutupi pasangan yang saya dukung. Saya sering make kaos Ny. Biar orang tau klo saya adalah pendukung Ny. Jadi saya make kaos bukan karena g punya kaos yang lain lho..tapi biar sekalian sosialisasi.*

Sikap ini ditunjukkan oleh Pa Mdr karena ia mengakui kalau dirinya tidak mau plin plan dalam mendukung calon walikota dan calon wakil walikota.

*...saya tujuannya saklek, nggak mau plin plan. Klo memang.....saya itu pinginnya ke A, ya udah.*

Pa H.Udn pun meski tidak secara terang-terangan menyatakan dukunganya, namun dia memakai kaos bergambar pasangan calon yang didukungnya.

*Kalau saya ya karena dikasih kaos dari pasangan tersebut ya dipakai. Sayang kan kalau nggak dipakai. Kalau ada yang nanya apakah saya milih pasangan yang ada dikaos tersebut ya saya*



*akan jawab. Tapi kalau tidak ditanya saya juga tidak akan promosi..tapi kalau ke murid-murid saya, saya minta dukungan untuk diperjuangkan.*

Contoh yang diberikan oleh Jawara kepada para pengikutnya dilakukan dengan jelas dan secara terang-terangan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya seorang jawara memang memiliki karakter terbuka dan berani. Sehingga dia tidak risau dengan apa-apa yang dikatakan oleh pihak lain.

## **2. Menginspirasi Visi Bersama**

Keterlibatan Pa Mdr ditunjukkan dengan mengarahkan masyarakat memilih calon yang dianggap benar menurutnya. Pasangan calon yang didukungnya merupakan hasil dari pembacaanya terhadap profil pasangan calon yang ada.

*Kalau pilkada, memang setelah saya pelajari, diantara kandidat-kandidat yang ada, yang lebih cocok untuk memimpin di kota serang ini si A umpamanya, ya harus kita arahkan ke situ.*

Alasan yang diberikan oleh Pa Mdr kepada orang-orang disekelilingnya adalah karena menurutnya pasangan yang didukungnya telah berpengalaman.

*Klo kita memilih pasangan Ny, terutama ya klo Ny itu sudah tau situasi kota serang, beliau kan sudah pernah menjadi bupati. Jadi menurut saya, itu paling cocok. Ahamdulillah jadi. Dari massa yang ada saya arahkan ke situ. Tolonglah karena pak Ny sudah tau kondisi dan situasi di serang ini, klo ini ya tolong sama-sama kita mendukung beliau aja, Alhamdulillah gitu*

Dengan berbagai alasan yang dikemukakanya Pa Mdr kemudian mengumpulkan para kasepuhan dan meyakinkan kasepuhan mengenai pilihanya. Selain itu Pa Mdr juga menggunakan saat-saat latihan

pencak silat untuk memaparkan pandangannya. Juga beberapa cabang perguruan yang tersebar di Kota Serang.

### 3. Menantang Proses

Jawara tidak memberikan tantangan kepada para pengikutnya. Para jawara langsung mengintruksikan kepada para pengikutnya untuk memilih pasangan calon tertentu meskipun permintaan dari pimpinan jawara disampaikan dengan cara meminta.

### 4. Memungkinkan Orang Lain Bertindak

Pa Mdr menggunakan cara musyawarah untuk meyakinkan masyarakat dikampungnya untuk memilih pilihannya. Dengan musyawarah tersebut, Pa Mdr mengharapkan agar warga dikampungnya memperjuangkan calon yang dipilihnya.

*Saya ngumpulin para kaepuhan. Terus saya sampein pandangan saya soal pasangan Ny itu. Alhamdulillah para kasepuhan menyerahkan ke saya aja gimana baeknya. Alhamdulillah juga kalau didesa ini pasangan yang kita pilih itu yang jadi.*

### 5. Menyemangati Jiwa

Untuk mengarahkan pengikutnya Pa Mdr menggunakan forum-forum latihan dan juga forum-forum pengajian dilingkungan sekitarnya.

*Ya kadang-kadang kalau ada momen-momen yang bisa kita manfaatkan, contohnya dalam latihan, dan juga dalam forum-forum silaturahmi, kalo ada pengajian-pengajian masuk juga. Cuma pencoblosannya aja. Dalam memilih kita bebas rahasia, apalagi di zaman reformasi ini kita hanya sebatas mengarahkan saja. Pa Mdr juga menggunakan jaringan persilatannya yang tersebar di Kota Serang untuk mensosialisasikan pilihannya.*

Didalam latihan tersebut Pa Mdr mengingatkan pentingnya kepemimpinan dan pentingnya mendukung pemimpin yang tepat untuk kebaikan masyarakat

#### 5.2.4 Pengaruh kepemimpinan Jawara dalam Pilkada

Jawara, dalam gambaran sebagai sosok dengan pakaian hitam, membawa golok dan berkata sompral (keras) hampir tidak ditemukan. Namun keberadaanya sebagai salah satu pemimpin ditengah masyarakat Banten khususnya di Kota Serang masih diakui keberadaanya. Jawara menjadi pemimpin menurut Ah, selain disebabkan karena symbol kekerasan yang melekat pada diri jawara juga karena jawara saat ini menguasai banyak sumber-sumber ekonomi. Ah bahkan mengatakan bahwa peran kepemimpinan jawara sedang menguat.

*Definisi awal jawara kan sebenarnya orang yang mendapatkan kesaktian dari kyai dan menggunakan kesaktiannya itu untuk menjalankan tujuannya. Jadi, pada dasarnya jawara itu modal dasar, ketika kekerasan itu digunakan dalam hal bisnis ya bisa-bisa saja. Cuma yang jelas memang jawara sendiri mengalami makna peyorasi. Seakan-akan orang yg malak di terminal itu bisa disebut jawara. Karena kita memang relative sulit untuk mencari sosok-sosok jawara yang kemudian berani katakanlah berani membela kebenaran, berani berbisnis dengan benar dan sebagainya.*

Penyelesaian masalah yang identik dilakukan oleh jawara, dicontohkan oleh Ah saat terjadi masalah antara jawara dengan wartawan.

*Contoh-contoh yang muncul dan dominan adalah mereka yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya membungkam media massa. Ada kejadian tahun 2001 seorang wartawan dikalungi golok, karena memberitakan tentang jawara. Para jawara demo di depan DPRD, sebanyak 80 orang, oleh media*

*tersebut ditulis 80 orang. Jawaranya marah minta ditulis seribu orang.*

Cara-cara kekerasan yang dipakai oleh kelompok jawara dalam menyelesaikan konflik saat ini sudah mulai berkurang karena para jawara sebagianya sudah bertransformasi sebagai penguasa dan pengusaha sehingga saat ini cara yang dipakai untuk menekan adalah dengan kekuatan birokrasi dan kekuatan uang.

*Kalau kemudian jawara bertransformasi, ya. Sekarangpun sudah tidak banyak muncul hitam-hitam bawa golok kemudian melakukan kekerasan, tapi karena mereka sudah berubah menjadi kelompok pengusaha dan juga menjadi kelompok penguasa. Maka, cara-cara penggunaan kekuatan birokrasi, cara-cara penggunaan uang misalnya tidak banyak menggantikan kekerasan itu. Saya pikir saat ini sulit untuk mengatakan seseorang yang saat ini disebut jawara sebagai jawara. Kalau yang tua mungkin iya. Sekarang begini saja, dari sekian orang yang disebut jawara, berapa orang sih yang masih punya kemampuan beladiri (pencak silat).*

Penguatan peran jawara dan penurunan peran kyai dikarenakan para jawara relative bisa memanfaatkan berbagai akses-akses ekonomi ketika mereka bergabung dalam satkar jawara.

*Jadi faktanya saat ini peran kyai sedang melemah sementara jawara sedang menguat. Hal ini dikarenakan karena ketika para jawara tergabung dalam satkar pendekar, banyak akses-akses ekonomi yang dibuka oleh pemerintah sehingga saat ini para jawara dalam posisi yang sangat kuat. Sementara Kyai tidak.*

Pendapat Ah bahwa pengaruh Kyai mengalami penurunan daripada peran Jawara tidak disepakati oleh Kyai Mhd. Menurut Kyai Mhd, jawara justeru menjadi orang yang paling patuh terhadap kyai.

*Dalam sorotan jauh, terkesan memang jawara itu lebih kuat dari kyai. Sebenarnya tidak. Karena jawara itu kalau datang kesini juga mencium tangan.*

Kesulitan untuk menentukan sosok jawara saat ini juga dialami oleh En. Menurutnya kalau Kyai sebagai sebagai pemimpin memang harus diakui, tapi kalau jawara sulit untuk mengukur kepemimpinannya karena ketidakjelasan siapa yang dimaksud dengan jawara.

*Kalau untuk jawara, karena kekuatan fisik yang ditonjolkan saya agak tidak setuju untuk dieksploitasi atau untuk dijadikan acuan sebagai pemimpin yang harus dilanjutkan.*

*Saya tidak melihat yang disebut jawara ini. Kalau misalkan sosoknya yang bagaimana juga saya.... karena keberadaannya juga dia ada di posisi mana dia tadi?*

Meskipun En melihat bahwa untuk pilkada peran Kyai dan Jawara tidak terlalu terlihat, namun En mengakui bahwa untuk opini public mereka masih berpengaruh.

*Kalau untuk opini public mah saya kira mereka masih mempunyai pengaruh sehingga terkesan pasangan calon itu didukung oleh banyak kalangan.*

Pa Mdr menuturkan kalau label jawara sebagai pemimpin itu boleh-boleh saja. Jawara itu menurut Pa Mdr hanyalah sebuah istilah saja.

*Jawara itu hanya istilah. Jawara itu jujur, apa itu istilahnya....Jadi sebetulnya yang disebut Jawara Banten yang sesungguhnya adalah Orang yang mau taat kepada Allah dan RasulNya, dan menghindari segala sesuatu yang dicegah, yang dilarang oleh Allah. Kalau jawara yang mabok-mabok itu mah lain lagi. Itu mah namanya preman. Kalau jawara itu syarat utamanya harus taat pada Allah dan Rasul. Harus menguasai jurus-jurus. Dan jurus-jurus itu sendiri memiliki makna tersendiri. Cuman saja saat ini*

*yang namanya jawara itu sering disalahgunakan. Manakala kita sudah memiliki kejawaraan ya harus nunduk.*

Menurut H. Udn, julukan jawara itu tidak berarti apa-apa. Kalau masyarakat memang menilai seseorang yang memiliki keahlian pencak silat itu dipandang sebagai pemimpin maka itu merupakan hak masyarakat.

*Kalau buat saya apalah artinya julukan jawara..menjadi jawara itu berat. Guru saya aja mungkin tidak mau dibilang jawara. Kalau melihat guru saya, beliau memang punya pengaruh..tapi kalau saya sebagai muridnya wallahu'alam..apakah saya pantas jika disebut sebagai pemimpin. Yang pasti julukan jawara mah ga mungkin keluar dari mulut jawara, itu pemberian masyarakat.*

Menurut Sli, saat ini yang namanya jawara sepertinya sudah tidak ada. Tinggal namanya saja.

*Kalau sekarang sih jawara itu kayaknya tinggal namanya aja. Kalau mau make kekerasan juga kan sekarang susah. Wong kita ini Negara hukum. Tapi kalau untuk nakut-nakutin sih kayaknya masih ada aja.*

Menurut Ah, dalam pilkada Kota serang tahun 2008, kekuatan jawara sepertinya tidak terlalu banyak digunakan. Yang lebih banyak digunakan adalah uang. Jadi secara pengaruh sebenarnya Jawara itu sudah tidak berpengaruh dalam pilkada. Yang paling berpengaruh adalah uang. Karena para jawara ini menguasai sumber-sumber ekonomi karenanya ia bisa mempengaruhi pemilih. Kalau pengaruh jawara dalam makna kekerasan, maka pengaruh seperti ini sulit untuk ditemukan kecuali di beberapa daerah tertentu saja.

*Kalau jawara sepertinya tidak banyak digunakan. Jadi lebih banyak menggunakan uang sebagai alat politiknya. Kalau jawara sebagai tokoh panutan sebenarnya orang melihat ketokohnya.*

*Misalnya salah satu jawara yang anaknya dicalonkan sebagai wakil walikota.*

Jawara dalam keseharian masyarakat Kota Serang hari ini sulit untuk ditemukan. Ciri-ciri fisik yang menggambarkan sosok jawara sudah jarang ditemukan. Jawara dalam pengertian asalnya sebagai murid kyai yang membela kebenaran dan memiliki sifat rendah hati, tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan. Mereka lebih menikmati keseharian mereka sebagaimana warga masyarakat lainya seperti menjadi pedagang, tukang las dan profesi-profesi kebanyakan masyarakat lainya.

Sementara itu kelompok jawara yang aktif dalam perpolitikan kebanyakan adalah jawara yang sudah bertransformasi dari jawara persilatan ke pengusaha atau penguasa. Ciri-ciri sebagai orang yang memiliki kelebihan terutama dalam ilmu beladiri tidak menurun kepada generasi berikutnya. Ilmu-ilmu beladiri itu hanya dimiliki oleh generasi awal kelompok jawara tersebut.

Dalam pilkada, ada dua kelompok besar jawara yang berada pada dua pasangan calon. Dukungan mereka kepada pasangan calon tersebut diakui oleh beberapa informan menjadi salah satu faktor pendukung pasangan calon tersebut memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama sehingga berhak untuk mengikuti putaran kedua.

Pengaruh Jawara sangat kuat terlihat karena disamping secara ketokohan kelompok Jawara tersebut disegani oleh masyarakat, para Jawara juga ditunjang oleh factor pendanaan yang sangat kuat karena selam ini mereka juga menguasai berbagai sumber-sumber ekonomi sebagai pengusaha..

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, ditemukan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Para Kyai mempraktikkan kepemimpinannya dengan cara-cara yang demokratis. Kepemimpinan Kyai lebih banyak dipraktikkan untuk mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dan agar masyarakat senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkada berlangsung. Kyai tidak menggunakan kepemimpinannya untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Para Kyai tidak terlihat memberikan contoh secara terang-terangan kepada pengikutnya untuk memilih pasangan calon yang menjadi pilihannya. Contoh dari Kyai untuk memilih pasangan tertentu hanya diberikan kepada para pengikutnya yang sudah dikenal dekat. Kyai juga tidak memberikan visi yang jelas kepada para pengikutnya untuk menyikapi pilkada. Kyai memberikan kesempatan yang luas kepada para pengikutnya untuk memilih pasangan calon walikota dan calon wakil walikota. Kyai menyemangati pengikutnya untuk memilih pasangan calon tertentu dengan mengingatkan bahwa setiap pilihan akan dimintakan pertanggungjawabannya diakhirat kelak.
2. Pengaruh Kyai dalam Pilkada tidak terlalu kuat yang dapat dilihat pada perolehan suara pasangan calon yang didukungnya. Pengaruh Kyai hanya terlihat disekitar pondok pesantrennya. Hal ini dikarenakan Kyai kepada masyarakat umum tidak secara jelas memberikan dukungannya kepada salah satu pasangan calon. Kyai hanya memperjelas dukungannya terhadap salah satu pasangan calon hanya kepada orang-orang yang telah dianggap dekat termasuk orang-orang yang berada didalam lingkungan pesantrennya. Pengaruh kuat Kyai lebih terlihat pada arahan-arahan



yang bersifat normative seperti tidak golput dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban

3. Jawara mempraktikkan kepemimpinannya dalam pilkada. Secara terang-terangan jawara mendukung pasangan calon tertentu. sikap jawara yang jelas terlihat dalam Praktik kepemimpinan yang dijalankannya. Jawara secara terang-terangan memberikan contoh kepada pengikutnya mengenai dukungan politiknya dengan memakai kaos bergambar pasangan calon yang dipilihnya. Jawara juga menempelkan stiker pasangan calon dirumahnya. Untuk menginspirasi visinya mengenai pemimpin yang tepat untuk Kota Serang, jawara mengumpulkan para kasepuhan. Jawara juga
4. Sikap Jawara yang lebih terang-terangan dalam mendukung salah satu pasangan calon membuat pengaruh Jawara cukup kuat dalam pilkada. Bahkan pasangan calon yang berhasil masuk keputaran kedua merupakan pasangan calon yang memiliki basis dukungan kelompok jawara. Keberhasilan calon yang didukung jawara dikarenakan jawara juga selama ini menguasai berbagai akses ekonomi sehingga jawara lebih memiliki sumber pendanaan yang kuat.

## 5.2 Saran

Dari penelitian ini, ada beberapa saran yang diberikan untuk para pemimpin diBanten:

1. Para pemimpin informal sebaiknya segera mengevaluasi peran kepemimpinannya ditengah masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki tokoh panutan. Saat ini masyarakat mulai tidak respek terhadap keberadaan Kyai dan Jawara. Hal ini dikarenakan mereka menganggap Kyai dan Jawara sudah tidak lagi memegang idealismenya.
2. Para Jawara kini menjadi sub kultur yang paling kuat di Banten. Oleh karena itu kekuatan-kekuatan kelompok lain seperti kelompok Kyai,

akademisi dan LSM perlu ditingkatkan untuk mengimbangi dominasi Jawara agar kekuasaan tidak dimonopoli oleh salah satu kelompok kepentingan saja.



## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Chudari, Mudjahid, Kumpulan Artikel/Buku Tentang Kebantenan, Tanpa Tahun

Creswell, John W, *Research Design*, Alih Bahasa Angkatan III dan IV KIK UI, KIK Press, Jakarta, 2002

Dharma, Koko Surya, Partisipasi Masyarakat Di Era Otonomi Daerah, PPPI, Setjen DPR RI, 2004

Dhofier Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, LP3ES Cetakan ke empat, Jakarta, 1985

Guillot, Claude, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2008

Ismail, Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam*, Mitra Cendekia, Jakarta, 2004

Indra, Hasbi, *Pesantren dan Transformasi Sosial*, Penamadani, Jakarta, 2003

Kausar, Ali Saleh, *Sistem Birokrasi Pemerintahan Di Daerah Dalam Bayang-bayang Budaya Ptron Klien*, PT Alumni, Bandung, 2009

Lubis, Nina H, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah*, LP3ES, Jakarta, 2003

Michrab, Halwany, *Catatan Masa Lalu Banten*, Penerbit Saudara, Serang, 1993

*Pembangunan sosial di Era Otonomi Daerah*. Pusat Pengkajian dan pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. 2004.

Ratnawati, Tri, *Pemekaran Daerah*, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2009

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Strauss, Anselm, Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2003

Supandri, E. Iwa Tuskana, *Sekapur Sirih Perjalanan Panjang dan Kronologis Terbentuknya Propinsi Banten 1953 - 2000* .

Syaukani, H.R., Gaffar, A., dan Rasyid, M.R., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, 2002

Wigno Subroto, Soetandyo., Bhenyamin Hoessein dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah*,  
institute for Local Development, Yayasan Tifa, Jakarta, 2005

Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan tradisi , Esai-esai pesantren*, LKiS, 2001

Wahidin, Samsul, *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala daerah*, Pustaka Pelajar,  
Jogjakarta, 2008

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses, MediaPressindo*, Yogyakarta,  
2007

### Website

<http://banten.bps.go.id/history2.htm>. *Sejarah Banten*, diakses 30 April 2009, jam 12:25

<http://www.ditpertaib.net/istiqlro/ist02-04.asp>, 2002

<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0501/15/daerah/1500855.htm>, *Bayang-bayang jawara dan ulama dalam pilkada langsung di banten*, diakses 30 April 2009 jam 06:01

[www.wikipedia.or.id](http://www.wikipedia.or.id)

### Dokumen

*Laporan Pertanggungjawaban Pilkada Kota Serang Tahun 2008*,  
KPU Kabupaten Serang, Tahun 2009

Suharto, *Revolusi Sosial di Banten 1945-1946*,

### Jurnal

Ronald Lukens-Bull, "Teaching Morality: Javanese Islamic Education in a globalizing era", *journal of Arabic and Islamic studies*, Vol 3, 2000, p.48

Okamoto Osaki & Abdul Hamid, *Jawara in Power 1999-2007*

### Makalah

Falah, Miftahul, *Kejawaraan Dalam Dinamika sejarah Kabupaten Lebak*, 2006

Hudaeri, Mohammad, *Tasbih dan Golok: Kedudukan dan Peran Kyai dan Jawara di Banten*, 2002

Purwadi, Slamet Johanes dan Ferry Muhammadsyah Siregar, "Pesantren dan Tantangan Modernitas di Indonesia",

Ruslan, Haedar, *Dinamika Kepemimpinan Kyai di pesantren*

Suryo, Joko, "*Tradisi Santri Dalam Historigrafi Jawa:  
Pengaruh Islam Di Jawa*", 2000



## **PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

### **PRAKTIK DAN PENGARUH KEPEMIMPINAN KYAI DAN JAWARA PADA PILKADA KOTA SERANG TAHUN 2008**

1. Bagaimanakah pandangan Kyai dan Jawara terhadap Pilkada
2. Bagaimanakah peta Kyai dan Jawara pada Pilkada Kota Serang Tahun 2008
3. Apakah Kyai (Jawara) memberikan contoh kepada para pengikutnya?
4. Apakah Kyai (Jawara) menginspirasi visi bersama kepada para pengikutnya?
5. Apakah Kyai (Jawara) memberikan tantangan kepada para pengikutnya?
6. Apakah Kyai (Jawara) memberikan kesempatan untuk bertindak kepada para pengikutnya?
7. Apakah Kyai (Jawara) memberikan semangat kepada para pengikutnya?
8. Bagaimanakah pengaruh Kyai (Jawara) dalam Pilkada Kota Serang Tahun 2008?

